

EDISI REVISI

RENCANA STRATEGIS TAHUN 2010-2014  
BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN  
SUMBER DAYA MANUSIA PERTANIAN



Kementerian Pertanian  
Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian  
Jakarta 2011



Sekretariat  
Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian  
Jakarta 2011

## **KATA PENGANTAR**

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional mengamanatkan Pimpinan Kementerian/Lembaga, termasuk unit kerja di bawahnya, untuk menyiapkan rencana strategis unit kerja. Untuk itu, Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Pertanian (BPPSDMP), selaku Unit Kerja Eselon I Kementerian Pertanian telah menyusun Rencana Strategis Tahun 2010-2014.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010, Kementerian Pertanian telah menerbitkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 61 tahun 2010 yang mengatur Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian. Pada sisi lain, dengan adanya perubahan lingkungan strategis, menuntut adanya penyesuaian terhadap Rencana Strategis Tahun 2010-2014 BPPSDMP yang telah disusun. Dengan demikian Rencana Strategis Tahun 2010-2014 BPPSDMP telah disusun dengan mempertimbangkan dan mengacu pada hal-hal tersebut di atas.

Rencana Strategis Tahun 2010-2014 BPPSDMP yang telah disesuaikan, diharapkan menjadi acuan bagi masing-masing unit kerja lingkup BPPSDMP dalam penetapan kegiatan dan anggaran tahunan.

Jakarta, .....2011  
Kepala Badan,

Dr. Ir. Ato Suprpto, MS



## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>KATA PENGANTAR</b>	<b>1</b>
<b>DAFTAR ISI</b>	<b>3</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	<b>7</b>
<b>1.1. Kondisi Umum SDM Pertanian</b>	<b>8</b>
1.1.1. Pelaku Utama	9
1.1.2. Aparatur Pertanian	13
<b>1.2. Potensi</b>	<b>15</b>
1.2.1. Aspek Kelembagaan	15
1.2.2. Aspek Ketenagaan	17
<b>1.3. Hasil yang dicapai BPSDMP dalam Tahun 2005-2009</b>	<b>17</b>
1.3.1. Revitalisasi Penyuluhan Pertanian	18
1.3.1.1. Aspek Peraturan Perundang-Undangan	18
1.3.1.2. Aspek Kelembagaan	19
1.3.1.3. Aspek Ketenagaan	20
1.3.1.4. Aspek Penyelenggaraan	20
1.3.2. Reposisi Pelatihan Pertanian	21
1.3.2.1. Aspek Kelembagaan	21
1.3.2.2. Aspek Ketenagaan	22
1.3.2.3. Aspek Penyelenggaraan	22
1.3.2.4. Aspek Kerjasama	22
1.3.3. Reorientasi Pendidikan Pertanian	23
1.3.3.1. Aspek Kelembagaan	23
1.3.3.2. Aspek Ketenagaan	24
1.3.3.3. Aspek Penyelenggaraan	24
1.3.3.4. Aspek Kerjasama	25
1.3.4. Pengembangan Administrasi dan Manajemen	26
1.3.4.1. Aspek Perencanaan	26
1.3.4.2. Aspek Keuangan dan Perlengkapan	26
1.3.4.3. Aspek Organisasi dan Kepegawaian	27
1.3.4.4. Aspek Evaluasi dan Pelaporan	28
1.3.5. Program Koordinatif	28
1.3.5.1. Fasilitasi Pengembangan Kawasan Agropolitan	28

1.3.5.2.	Facilitasi Pemberdayaan Lembaga Mandiri yang Mengakar di Masyarakat (LM3)	29
1.3.5.3.	Facilitasi Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP)	30
1.3.6.	Program dengan Dana PHLN	31
1.3.6.1.	Program Pemberdayaan Petani melalui Teknologi Informasi/P3TIP ( <i>Farmers Empowerment through Agricultural Technology and Information/FEATI</i> )	31
1.3.6.2.	Program Pemberdayaan Masyarakat Perdesaan dalam Pembangunan Pertanian ( <i>Rural Empowerment on Agriculture Development/READ</i> )	32
<b>1.4.</b>	<b>Permasalahan dan Tantangan</b>	<b>34</b>
1.4.1.	Permasalahan	34
1.4.1.1.	Aspek Penyuluhan Pertanian	35
1.4.1.2.	Aspek Pelatihan Pertanian	36
1.4.1.3.	Aspek Pendidikan Pertanian	36
1.4.1.4.	Aspek Administrasi dan Manajemen	37
1.4.2.	Tantangan	38
<b>BAB II</b>	<b>VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN</b>	<b>41</b>
<b>2.1.</b>	<b>Visi</b>	<b>41</b>
<b>2.2.</b>	<b>Misi</b>	<b>42</b>
<b>2.3.</b>	<b>Tujuan dan Sasaran</b>	<b>42</b>
2.3.1.	Tujuan	42
2.3.2.	Sasaran Strategis	43
2.3.2.1.	Penyuluhan Pertanian	43
2.3.2.2.	Pelatihan Pertanian	45
2.3.2.3.	Pendidikan, Standardisasi dan Sertifikasi Profesi Pertanian	47
2.3.2.4.	Dukungan Administrasi Manajemen dan Teknis Lainnya	49
<b>BAB III</b>	<b>ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, PROGRAM DAN KEGIATAN, SERTA INDIKATOR</b>	<b>49</b>
<b>3.1.</b>	<b>Arah Kebijakan</b>	<b>50</b>
<b>3.2.</b>	<b>Strategi</b>	<b>50</b>

<b>3.3.</b>	<b>Program dan Kegiatan</b>	<b>54</b>
3.3.1.	Program	54
3.3.2.	Kegiatan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian	54
	3.3.2.1. Pemantapan Sistem Penyuluhan Pertanian	55
	3.3.2.2. Pemantapan Sistem Pelatihan Pertanian	57
	3.3.2.3. Revitalisasi Sistem Pendidikan, serta Pengembangan Standardisasi dan Sertifikasi Profesi Pertanian	58
	3.3.2.4. Dukungan Administrasi Manajemen dan Teknis Lainnya	61
<b>3.4.</b>	<b>Kegiatan dan Indikator</b>	<b>62</b>
<b>BAB IV</b>	<b>PENUTUP</b>	<b>75</b>

#### **DAFTAR TABEL**

TABEL I	Kegiatan, Indikator Output dan Outcome Kegiatan BPPSDMP	59
---------	---	----

#### **LAMPIRAN**

LAMPIRAN 1. Visi, Misi, Tujuan, Sasaran Strategis, Kebijakan, Strategi, dan  
Program BPPSDMP Tahun 2010-2014.

LAMPIRAN 2. Kegiatan, Sub Kegiatan, Sasaran, Indikator, Target, dan  
Anggaran Kegiatan PPSDMP Tahun 2010-2014.



# BAB I.

## PENDAHULUAN

Sektor pertanian dimasa mendatang masih memegang peran strategis sebagai penghela pembangunan ekonomi nasional, karena memberikan kontribusi nyata bagi 237 juta penduduk Indonesia dalam penyediaan bahan baku industri, peningkatan Produk Domestik Bruto (PDB), penghasil devisa negara melalui ekspor, penyedia lapangan pekerjaan, dan peningkatan pendapatan masyarakat. Untuk meningkatkan peran sektor pertanian sebagai penghela pembangunan ekonomi nasional, Kementerian Pertanian telah menetapkan visi pembangunan pertanian 2010 - 2014, yaitu **“Terwujudnya pertanian industrial unggul berkelanjutan yang berbasis sumberdaya lokal untuk meningkatkan kemandirian pangan, nilai tambah, daya saing, ekspor, dan kesejahteraan petani”**.

Target utama visi pembangunan pertanian ditujukan untuk mewujudkan empat sukses pembangunan pertanian, yaitu: 1) pencapaian swasembada dan swasembada berkelanjutan, 2) peningkatan diversifikasi pangan, 3) peningkatan nilai tambah, daya saing dan ekspor, serta 4) peningkatan kesejahteraan petani.

Dalam rangka mewujudkan empat sukses pembangunan pertanian tersebut, diperlukan dukungan ketersediaan sumberdaya manusia pertanian yang profesional, kreatif, inovatif, dan berwawasan global. Dukungan tersebut dilakukan melalui pemantapan sistem penyuluhan, pemantapan sistem pelatihan, revitalisasi sistem pendidikan, standarisasi dan sertifikasi profesi pertanian serta pemantapan sistem pelayanan administrasi dan pelayanan teknis.

Pemantapan dan revitalisasi sistem tersebut ditujukan untuk: 1) menumbuhkembangkan kelembagaan penyuluhan, kelembagaan petani dan usaha tani; 2) meningkatkan kapasitas aparatur pertanian dan kompetensi non aparatur pertanian melalui penyuluhan, pelatihan, pendidikan, standardisasi dan sertifikasi profesi pertanian; 3) mengembangkan kelembagaan penyuluhan, pelatihan, dan pendidikan pertanian baik milik pemerintah maupun masyarakat; serta 4) meningkatkan kualitas pelayanan administrasi dan pelayanan teknis.

## **1.1. Kondisi Umum SDM Pertanian**

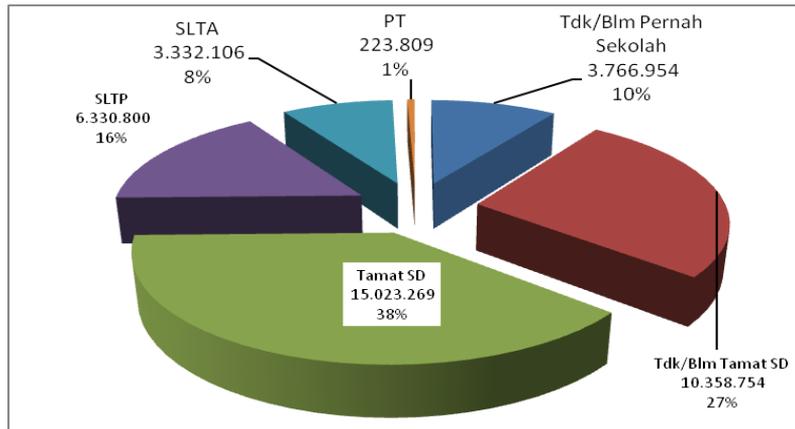
Sumberdaya manusia pertanian, baik aparatur dan non aparatur pertanian (pelaku utama dan pelaku usaha), memiliki peran yang strategis dalam mewujudkan empat sukses pembangunan pertanian. Kondisi umum aparatur dan non aparatur pertanian secara rinci dijelaskan sebagai berikut.

### **1.1.1. Pelaku Utama**

Ditinjau dari segi pendidikan, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2010, dari total 39.035.692 orang pelaku utama pembangunan pertanian (petani), 15.023.269 orang (38,49%) berlatar belakang pendidikan tamat SD; 10.358.754 orang (26,54%) tidak/belum tamat SD; 6.330.800 orang (16,22%) tamat SLTP; 332.106 orang (8,54%) tamat SLTA; dan 223.809 orang (0,57%) tamat Perguruan Tinggi (diploma dan sarjana). Selain itu masih tercatat sebanyak 3.766.954 orang (9,65%) tidak atau belum pernah sekolah.

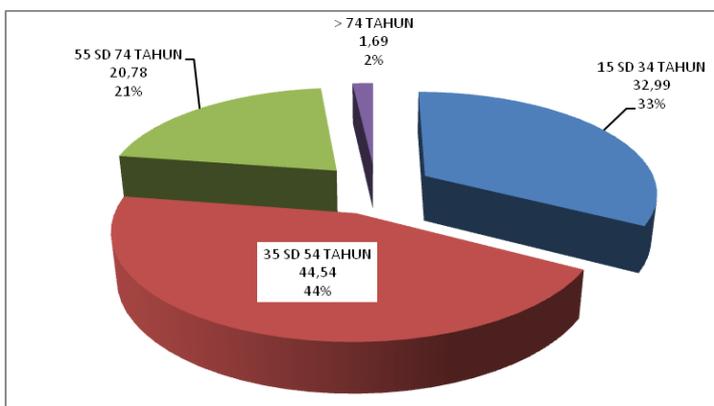
Kondisi ini menunjukkan bahwa dari segi pendidikan, kualitas pelaku utama pembangunan pertanian masih rendah, sehingga diperlukan upaya

peningkatan kualitas pendidikan. Sebaran pelaku utama pembangunan pertanian berdasarkan latar belakang pendidikan dapat dilihat pada Gambar 1.



**Gambar 1.** Pelaku Utama Pembangunan Pertanian Berdasarkan Latar Belakang Pendidikan

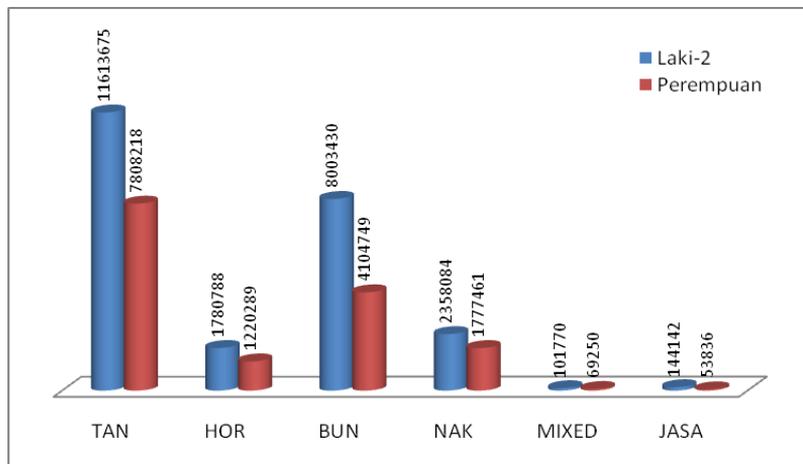
Berdasarkan sebaran umur menunjukkan bahwa 12.879.608 orang (33,00%) berusia 15 sampai dengan 34 tahun; 17.387.501 orang (44,54%) berusia 35 sampai dengan 54 tahun; dan 8.768.583 orang (22,46%) berusia di atas 54 tahun. Kondisi ini menunjukkan bahwa sebagian besar pelaku utama pembangunan pertanian telah berusia lanjut sehingga perlu adanya kaderisasi dan menumbuhkan minat generasi muda untuk bekerja di sektor pertanian dan sekaligus mencegah *second lost generation*. Sebaran pelaku utama pembangunan pertanian berdasarkan sebaran umur dapat dilihat pada Gambar 2.



**Gambar 2.** Pelaku Utama Pembangunan Pertanian Berdasarkan Sebaran Umur

Selanjutnya, berdasarkan jenis usaha, pelaku utama pembangunan pertanian yang berusaha di subsektor Tanaman Pangan berjumlah 19.421.893 orang (49,75%), terdiri atas 11.613.675 orang (59,80%) laki-laki dan 7.808.218 orang (40,20%) perempuan; subsektor Peternakan berjumlah 4.135.545 orang (10,50%), terdiri atas 2.358.084 orang (57,02%) laki-laki dan 1.777.461 orang (42,98%) perempuan; subsektor Hortikultura berjumlah 3.001.077 orang (7,69%), terdiri atas 1.780.788 orang (59,34%) laki-laki dan 1.220.289 orang (40,66%) perempuan; subsektor Perkebunan berjumlah 12.108.179 orang (31,02%), terdiri atas 8.003.430 orang (66,10%) laki-laki dan 4.104.749 orang (33,90%) perempuan; subsektor kombinasi/campuran Tanaman Pangan, Perkebunan dan Peternakan berjumlah 171.020 orang (0,44 %), terdiri atas 201.001.889 orang (61,49%) laki-laki dan 15.033.808 orang (38,51%) perempuan. Selain itu tercatat sebanyak 197.978 orang (0,51%) terdiri atas 144.142 orang (72,81%) laki-laki dan 53.836 orang (27,19%) perempuan bergerak di subsektor jasa penunjang pertanian.

Kondisi ini menunjukkan bahwa mayoritas pelaku utama pembangunan pertanian bekerja di sektor tanaman pangan dan perkebunan. Sebaran pelaku utama pembangunan pertanian berdasarkan subsektor dapat dilihat pada Gambar 3.

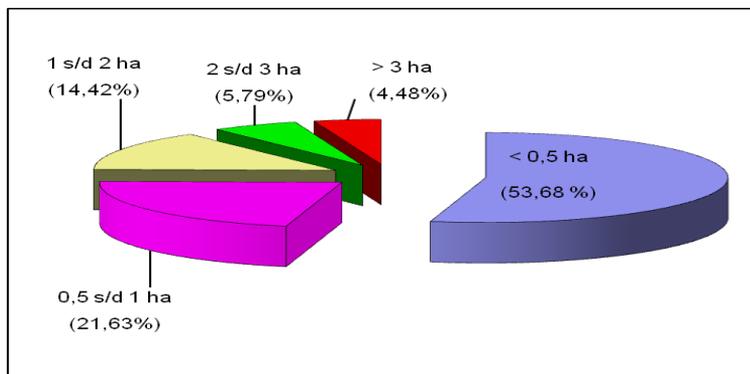


**Gambar 3.** Pelaku Utama Pembangunan Pertanian Berdasarkan Jenis Usaha/Subsektor Pertanian

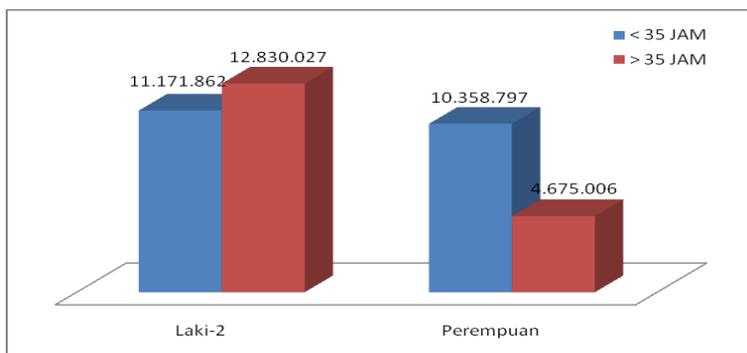
Berdasarkan kepemilikan lahan, pelaku utama subsektor Tanaman Pangan yang memiliki lahan kurang dari 0,5 Ha sebanyak 53,68%; antara 0,5 sampai dengan 1 ha sebanyak 21,63%; antara 1 sampai dengan 2 ha sebanyak 14,42%; antara 2 sampai dengan 3 ha sebanyak 5,79%; dan di atas 3 ha sebanyak 4,48% seperti terlihat pada Gambar 4.

Di sisi lain, berdasarkan curahan waktu bekerja menunjukkan bahwa 21.530.659 orang (55,16%) bekerja di bawah 35 jam per minggu dan 17.505.033 orang (44,84%) bekerja di atas 35 jam per minggu. Sedangkan ditinjau dari aspek jenis kelamin, 11.171.862 orang laki-laki (51,59%) dan

10.358.797 orang perempuan (48,10%) bekerja di bawah 35 jam per minggu. Sementara itu 12.830.027 orang laki-laki (73,30%) dan 4.675.006 orang perempuan (26,70%) bekerja di atas 35 jam per minggu. Sebaran pelaku utama pembangunan pertanian berdasarkan curahan waktu bekerja dan jenis kelamin dapat dilihat pada Gambar 5.



**Gambar 4.** Pelaku Utama Sub Sektor Tanaman Pangan Berdasarkan Kepemilikan Lahan

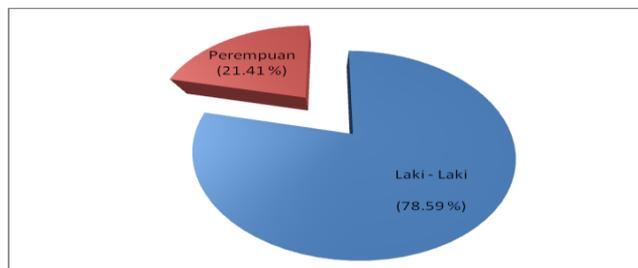


**Gambar 5.** Pelaku Utama Pembangunan Pertanian Berdasarkan Curahan Waktu Bekerja

### 1.1.2. Aparatur Pertanian

Keberhasilan pembangunan pertanian sangat ditentukan oleh profesionalitas aparatur yang berperan sebagai regulator, fasilitator, motivator dan dinamisator. Aparatur pertanian yang dibutuhkan dalam mendukung pembangunan pertanian meliputi: 1) perumus kebijakan, 2) perencana pembangunan, 3) tenaga manajemen dan administrasi, 4) peneliti pertanian, 5) widyaiswara, dosen, guru, dan instruktur, 6) tenaga fungsional Rumpun Ilmu Hayat Pertanian (RIHP), 7) tenaga karantina pertanian, dan 8) tenaga fungsional lainnya.

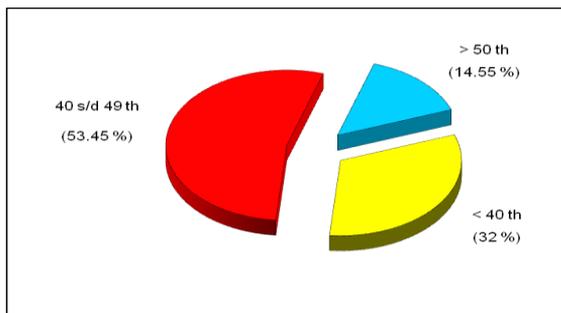
Berdasarkan hasil pengkajian tentang profil aparatur pertanian tahun 2008, jumlah aparatur pertanian sebanyak 96.647 orang, yang terdiri atas 76.009 orang laki-laki (78,59%) dan 20.638 orang perempuan (21,41%) distribusi aparatur pertanian berdasarkan jenis kelamin dapat dilihat pada Gambar 6.



**Gambar 6.** Aparatur Pertanian Berdasarkan Jenis Kelamin

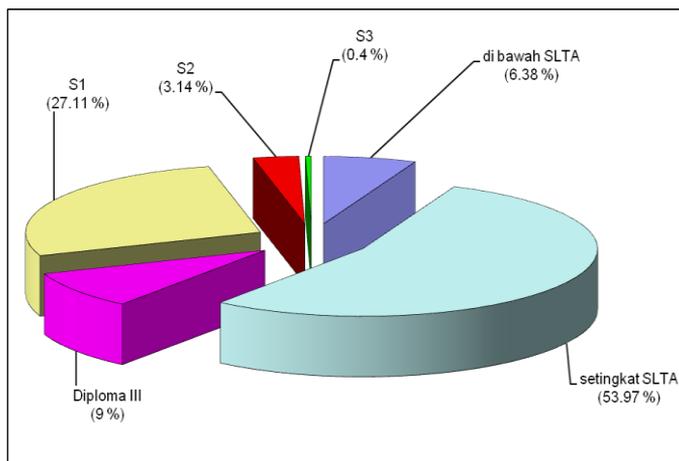
Berdasarkan sebaran usia, aparatur pertanian yang berusia di bawah 40 tahun sebanyak 32%, antara 40 sampai dengan 49 tahun

sebanyak 53,45% dan usia di atas 50 tahun sebanyak 14,55%. Gambar 7 menyajikan informasi sebaran aparatur pertanian berdasarkan usia.



**Gambar 7.** Aparatur Pertanian Berdasarkan Usia

Ditinjau dari tingkat pendidikan, seperti terlihat pada Gambar 8, aparatur pertanian yang berpendidikan dibawah SLTA sebanyak 6,38 %, setingkat SLTA sebanyak 53,97%, Diploma III sebanyak 9,00%, S1 sebanyak 27,11%, S2 sebanyak 3,14% dan S3 sebanyak 0,40%.



**Gambar 8.** Aparatur Pertanian Berdasarkan Tingkat Pendidikan

## **1.2. Potensi**

### **1.2.1. Aspek Kelembagaan**

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010, Kementerian Pertanian telah menerbitkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 61 tahun 2010 yang mengatur Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian. Mengacu pada Peraturan Menteri Pertanian tersebut, BPPSDMP terdiri dari empat Unit Eselon II di tingkat Pusat, yaitu; 1) Pusat Penyuluhan Pertanian; 2) Pusat Pelatihan Pertanian, 3) Pusat Pendidikan, Standardisasi dan Sertifikasi Profesi Pertanian, serta 4) Sekretariat Badan.

Disamping organisasi yang ada di pusat, BPPSDMP juga memiliki sembilan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Bidang Pendidikan Pertanian dan sepuluh UPT Bidang Pelatihan Pertanian. Kesembilan UPT Bidang Pendidikan Pertanian, yaitu: Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian (STPP) Medan, STPP Bogor, STPP Magelang, STPP Malang, STPP Gowa, STPP Manokwari, Sekolah Pertanian Pembangunan (SPP) Negeri Sembawa, SPP Negeri Banjarbaru, dan SPP Negeri Kupang. Sedangkan UPT Bidang Pelatihan Pertanian, meliputi: Pusat Pelatihan Manajemen dan Kepemimpinan Pertanian (PPMKP) Ciawi, Balai Besar Pelatihan Pertanian (BBPP) Lembang, BBPP Ketindan, BBPP Binuang, BBPP Batangkaluku, Balai Besar Pelatihan Peternakan Batu, Balai Besar Pelatihan Peternakan Noelbaki, Balai Besar Pelatihan Kesehatan Hewan (BBPKH) Cinagara, Balai Pelatihan Pertanian (BPP) Jambi, dan BPP Lampung.

Sampai dengan akhir tahun 2010, BPPSDMP membina; 1 STPP Daerah (STPP Aceh), 71 SPP pemerintah daerah dan swasta, 19 Balai Diklat Pertanian Daerah (BDP), 708 Pusat Pelatihan Pertanian dan Perdesaan Swadaya (P4S), 14 Badan Koordinasi Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan; 12 Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Pertanian tingkat Provinsi; 7 dinas lingkup pertanian tingkat provinsi yang menangani penyuluhan pertanian; 127 Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan; 161 Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan di tingkat Kabupaten/Kota; 203 dinas lingkup pertanian tingkat kabupaten/kota yang menangani penyuluhan pertanian, serta 4.239 Balai Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan di tingkat kecamatan.

### **1.2.2. Aspek Ketenagaan**

Sampai dengan akhir tahun 2010, jumlah aparatur BPPSMP tingkat Pusat dan UPT adalah 2.285 orang, dengan latar belakang pendidikan: sampai dengan SLTA sebanyak 1.122 orang (49,1%), Diploma III sebanyak 112 orang (4,9%), S1/D4 sebanyak 672 orang (29,41%), S2 sebanyak 352 orang (15,4%), dan S3 sebanyak 27 orang (1,18%).

Tenaga fungsional di bidang penyuluhan, pelatihan dan pendidikan yang dimiliki dan dibina oleh BPPSDMP terdiri atas: Penyuluh Pertanian PNS sebanyak 27.922 orang, Penyuluh Pertanian Honorer sebanyak 1.251 orang, Penyuluh Pertanian Swadaya sebanyak 9.628 orang, Tenaga Harian Lepas Tenaga Bantu Penyuluh Pertanian (THL-TB PP) sebanyak 24.551 orang, 290 orang widyaiswara, 227 orang dosen, dan 553 orang guru. Selain

tenaga fungsional, BPPSDMP juga memiliki tenaga kediklatan sebanyak 790 orang dan tenaga kependidikan sebanyak 427 orang.

### **1.3. Hasil yang Dicapai Tahun 2005-2009**

Pada periode tahun 2005 – 2009, BPPSDMP yang saat itu masih bernama Badan Pengembangan SDM Pertanian (BPSDMP) melaksanakan empat Program Aksi, yaitu: 1) Revitalisasi Penyuluhan Pertanian, 2) Reposisi Pelatihan Pertanian, 3) Reorientasi Pendidikan Pertanian, dan 4) Pengembangan Administrasi dan Manajemen SDM Pertanian.

Selain itu, BPSDMP juga melaksanakan Program Pemberdayaan Masyarakat Tani dengan dana Pinjaman/Hibah Luar Negeri (PHLN), yang meliputi: Program Pemberdayaan Petani melalui Teknologi dan Informasi Pertanian/ P3TIP (*Loan Bank Dunia*), Pemberdayaan Perdesaan dan Pembangunan Pertanian (*Loan IFAD*), Pemberdayaan Masyarakat Pertanian Pasca Gempa dan P4S (*Grant Counterpart Fund-Second Kennedy Round*); Program Koordinatif (Program Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan/PUAP, Program Pengembangan Agribisnis melalui Lembaga Mandiri yang Mengakar di Masyarakat/LM3, dan Program Agropolitan).

Hasil-hasil yang telah dicapai selama periode 2005-2009 adalah sebagai berikut.

#### **1.3.1. Revitalisasi Penyuluhan Pertanian**

##### **1.3.1.1. Aspek Peraturan Perundang-Undangan**

- Undang-undang nomor 16 tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan.

- Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2009 tentang Pembiayaan, Pembinaan dan Pengawasan Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan.
- Peraturan Menteri Pertanian nomor 273 /Kpts/OT.160/4/2007, tentang Pedoman Pembinaan Kelembagaan Petani.
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/02/MENPAN/2/2008 tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Pertanian dan Angka Kreditnya.
- Peraturan Menteri Pertanian Nomor 61/Permentan/OT.140/11/2008 tentang Pedoman Pembinaan Penyuluh Pertanian Swadaya dan Swasta.
- Peraturan Menteri Pertanian nomor 165 /Kpts/OT.160/12/2008, tentang Komisi Penyuluhan Pertanian Nasional.
- Peraturan Menteri Pertanian nomor 25/Permentan/OT.140/5/2009 tentang Pedoman Penyusunan Programa Penyuluhan Pertanian.
- Peraturan Menteri Pertanian nomor 42/Permentan/OT.140/10/2009 tentang Metode Penyuluhan Pertanian.
- Peraturan Menteri Pertanian nomor 49/Permentan/OT.140/10/2009 tentang Kebijakan dan Strategi Penyuluhan Pertanian.
- Peraturan Menteri Pertanian nomor 51/Permentan/OT.140/12/2009 tentang Pedoman Standar Minimal dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian.
- Peraturan Menteri Pertanian Nomor 01/Permentan/OT.140/1/2008 tentang Pedoman Pembinaan THL-TBPP.

### **1.3.1.2. Aspek Kelembagaan**

- Terbentuknya 14 (empat belas) Badan Koordinasi Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan, serta 12 (dua belas) Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan di tingkat Provinsi.
- Terbentuknya 129 Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan serta 151 Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan di tingkat Kab/Kota.
- Terbentuknya 3.953 Balai Penyuluhan Pertanian di tingkat kecamatan dari 5.324 kecamatan.
- Terbentuknya 274.229 Poktan dan 28.304 Gapoktan.

### **1.3.1.3. Aspek Ketenagaan**

- Terasilitasinya Biaya Operasional Penyuluh (BOP) bagi 29.922 Penyuluh Pertanian PNS.
- Terlaksananya rekrutmen dan penempatan 24.608 orang Tenaga Harian Lepas - Tenaga Bantu (THL-TB) Penyuluh Pertanian.

### **1.3.1.4. Aspek Penyelenggaraan**

- Tersusun dan terdistribusikannya materi penyuluhan pertanian dalam berbagai media cetak (87 judul leaflet, 69 judul liptan, 6 judul brosur) dan elektronik (74 episode siaran TV, 3 judul iklan layanan masyarakat, 82 episode siaran radio)
- Terdistribusikannya 1.000 unit telepon genggam dan 6.692 unit kendaraan roda dua untuk penyuluh pertanian.

- Terdistribusikannya empat unit mobil penyuluhan pertanian untuk tiga Badan Koodinasi Penyuluhan (Provinsi Lampung, Bengkulu, dan Kalimantan Selatan), dan PPMKP Ciawi.
- Terdistribusikannya 168.000 buah buku kerja bagi penyuluh pertanian PNS dan THL-TB Penyuluh Pertanian.
- Terlaksananya pengembangan 531 unit BPP Model pada 440 kabupaten/kota di 33 provinsi.
- Terdistribusikannya Tabloid Sinar Tani sebanyak 3.996.624 eksemplar bagi penyuluh pertanian PNS.
- Terselenggaranya pencaanangan Revitalisasi Penyuluhan Pertanian di Kabupaten Banyuasin yang diikuti oleh 1.052 orang penyuluh pertanian.
- Terselenggaranya PENAS XII di Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan yang diikuti oleh 30.000 petani.
- Terselenggaranya Jambore Penyuluh Pertanian di Guci, Kabupaten Tegal dan Cibodas, Kabupaten Cianjur yang diikuti oleh kurang lebih 8.000 orang penyuluh pertanian.

### **1.3.2. Reposisi Pelatihan Pertanian**

#### **1.3.2.3. Aspek Kelembagaan**

- Meningkatkan status eselonering Balai Diklat Perkebunan dan Teknologi Pasang Surut, Binuang, serta Balai Diklat Agribisnis Ternak Potong dan Teknologi Lahan Kering, Noelbaki.

- Berubahnya tupoksi 8 UPT Pelatihan yang berorientasi komoditas menjadi berorientasi agribisnis dan 1 UPT Pelatihan berorientasi manajemen dan kepemimpinan.
- Berubahnya status kelembagaan UPTD Balai Diklat Pertanian Lampung menjadi UPT Pelatihan Pusat.
- Terasilitasinya 234 Pusat Pelatihan Pertanian dan Perdesaan Swadaya (P4S) baru, dan terbinaanya 708 P4S.

#### **1.3.2.2. Aspek Ketenagaan**

- Ditetapkannya 66 orang widyaiswara baru, dan meningkatnya profesionalisme 290 widyaiswara UPT Pelatihan Pusat dan UPT Pelatihan Provinsi.
- Meningkatnya kompetensi 300 orang instruktur/fasilitator/ pengelola P4S.
- Meningkatnya kompetensi 117 orang tenaga non kediklatan.

#### **1.3.2.3. Aspek Penyelenggaraan**

- Terakreditasinya 16 jenis diklat teknis di 9 UPT Pelatihan sesuai keputusan LAN.
- Meningkatnya kompetensi kerja 4.146 orang CPNS melalui Diklat Pra Jabatan.
- Meningkatnya kompetensi kerja 1.059 orang aparatur pertanian melalui Diklat Pimpinan.
- Meningkatnya kompetensi kerja 59.634 orang aparatur pertanian melalui Diklat Teknis Agribisnis dan Diklat Fungsional Pertanian.

- Meningkatnya kompetensi kerja 56.262 orang non aparatur pertanian melalui pelatihan/permagangan di bidang pertanian/agribisnis.

#### **1.3.2.4. Aspek Kerjasama**

- Meningkatnya kompetensi kerja 134 orang peserta dari negara-negara di Asia melalui berbagai pelatihan dalam kerangka kerjasama ASEAN.
- Meningkatnya kompetensi kerja 173 orang peserta dari negara-negara di Afrika dan Pasifik melalui berbagai pelatihan dalam kerangka kerjasama bilateral dengan Jepang/JICA, Sudan, Tanzania, dan Gambia.
- Meningkatnya kompetensi kerja 365 orang peserta dari anggota APEC dan APO melalui berbagai pelatihan dalam kerangka kerjasama multilateral APEC dan APO.
- Meningkatnya kompetensi kerja 247 orang peserta melalui Program Magang Petani Muda Indonesia di Jepang.
- Meningkatnya kapasitas PPMKP Ciawi, BBPKH Cinagara, BBPP Lembang, BBPP Ketindan, BBPP Batu, BDP Cihea dan 10 P4S dalam penyelenggaraan pelatihan/permagangan internasional.

#### **1.3.3. Reorientasi Pendidikan Pertanian**

##### **1.3.3.1. Aspek Kelembagaan**

- Ditetapkannya status akreditasi 12 program studi di enam STPP.

- Meningkatnya status akreditasi program studi di 33 SMK-PP UPT Pusat/Pemda/Swasta.
- Ditetapkannya tiga program studi baru di 12 SMK-PP Pemda dan Swasta.
- Terbitnya Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43 sampai dengan 48 tahun 2008 tentang Penambahan Tugas dan Fungsi STPP untuk Melaksanakan Diklat Fungsional RIHP.

#### **1.3.3.2. Aspek Ketenagaan**

- Meningkatnya kompetensi 314 orang guru SMK-PP dan 195 orang dosen STPP melalui pelatihan metodologi dan teknis agribisnis.
- Meningkatnya kompetensi 30 orang dosen STPP sebagai fasilitator diklat melalui Diklat Calon Widyaiswara.
- Meningkatnya kemampuan berbahasa Inggris 60 orang guru SMK-PP dalam rangka persiapan peningkatan status SMK-PP menjadi Sekolah Bertaraf Internasional (SBI).

#### **1.3.3.3. Aspek Penyelenggaraan**

- Dihasilkannya 2.654 orang lulusan dari 7 STPP.
- Dihasilkannya 13.289 orang lulusan dari 79 SMK-PP.
- Meningkatnya kompetensi 3.334 orang penyuluh pertanian melalui Diklat Fungsional Penyuluh Pertanian.
- Meningkatnya kompetensi 210 orang POPT melalui Diklat Fungsional POPT.

- Dihasilkannya 25.580 orang calon THL-TB PP melalui Diklat THL-TB Penyuluh Pertanian.
- Meningkatnya kompetensi 50 orang Pengawas Mutu Hasil Pertanian (PMHP) melalui Diklat Dasar PMHP.
- Dihasilkannya 93 orang calon THL-TB Petugas Karantina Pertanian melalui Diklat pembekalan THL-TB PKP.
- Meningkatnya keterampilan 1.042 orang siswa SMK-PP dan 79 orang mahasiswa STPP di bidang perkebunan berbasis kelapa sawit.
- Meningkatnya kompetensi 205 orang sarjana pertanian melalui *pelatihan dan permagangan (retooling)* di bidang perkebunan berbasis kelapa sawit.
- Tumbuhnya 271 orang wirausahawan muda pertanian alumni SMK-PP dan STPP melalui program bantuan modal usaha.

#### **1.3.3.4. Aspek Kerjasama**

- Meningkatnya kemampuan, keterampilan dan wawasan 15 orang siswa SMK-PP melalui program pertukaran siswa selama satu tahun di sekolah menengah pertanian Gunma, Jepang.
- Meningkatnya keterampilan dan wawasan 10 orang siswa SMK-PP melalui praktek kerja usaha selama satu semester di sekolah menengah pertanian Fukui, Jepang.
- Meningkatnya kompetensi 30 orang alumni SMK-PP melalui program magang usaha pertanian selama satu tahun di Ibaraki, Jepang.

- Terfasilitasinya 13.192 orang siswa SMK-PP dan 1.071 orang mahasiswa STPP untuk menerima Beasiswa Supersemar.
- Meningkatnya kompetensi akademik bagi aparatur pertanian melalui program S2 sebanyak 137 orang dan melalui program S3 sebanyak 39.

### **1.3.4. Pengembangan Administrasi dan Manajemen**

#### **1.3.4.1. Aspek Perencanaan**

- Tersusun dan terdistribusikannya Pedoman Umum Pelaksanaan Program dan Kegiatan BPSDMP sebanyak 1.000 eksemplar.
- Tersusun dan tercetaknya dokumen Daftar Isian Pelaksana Anggaran (DIPA) dan Surat Rincian Alokasi Anggaran (SRAA) setiap tahun, sejumlah satuan kerja lingkup BPSDMP.
- Tersusunnya Standar Biaya Khusus (SBK) untuk kegiatan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan pertanian, setiap tahun.
- Terlaksananya pengembangan data dan informasi pada 20 unit kerja lingkup BPSDMP (data base, koneksi jaringan data dan informasi, website).
- terselesaikannya penyiapan program kerjasama (FEATI, READ) dengan lembaga donor (Bank Dunia, IFAD).
- terselesaikannya penyiapan dan pelaksanaan program kerjasama dengan sumber dana Counterpart Fund- Second Kennedy Round (CF-SKR).
- terselesaikannya laporan akhir Proyek Pembinaan dan Peningkatan Pendapatan Petani Kecil (*P4K Project Completion Review Mission*).

#### **1.3.4.2. Aspek Keuangan dan Perlengkapan**

- Tersusunnya Laporan Keuangan dan Neraca Badan PSDMP (Laporan SAK dan SIMAK BMN) setiap semester.
- Tersusunnya Laporan Barang Milik Negara dan Neraca Barang BPSDMP setiap semester.
- Tervalidasinya Laporan Rekonsiliasi Realisasi Anggaran satuan kerja lingkup BPSDMP setiap semester untuk seluruh satuan kerja BPSDMP.
- terselesaikannya inventarisasi dan penilaian BMN 93 Satuan Kerja lingkup BPSDMP (2 Satker Pusat, 20 Satker UPT, 28 Satker Dekonsentrasi, dan 43 Satker Tugas Pembantuan).
- Terbitnya sertifikat tanah untuk 3 lokasi (STPP Gowa, BPP Lampung, dan Mess BPSDMP).
- terselesaikannya dua aset bermasalah (Lahan praktek STPP Manokwari dan Lahan Kebun Praktek STPP Magelang di Karangsari-Yogyakarta).
- Tersusunnya Penyempurnaan Pedoman Umum Pengelolaan Keuangan dan Perlengkapan serta Pedoman Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN), setiap tahun.
- Tersusunnya Sistem Informasi Manajemen Akuntansi dan Keuangan (SIMAK) dan Sistem Informasi Manajemen Barang Persediaan lingkup BPSDMP.

#### **1.3.4.3. Aspek Organisasi dan Kepegawaian**

- Tersusunnya satu buku *Standard Operational Procedure* (SOP) Pengelolaan 3M (*Man, Money and Material*).

- Tersusunnya formasi, *bezetting* dan kebutuhan pegawai setiap tahun.
- Terlaksananya pengangkatan 401 orang tenaga honorer menjadi CPNS.
- Penandatanganan Pakta Integritas oleh 498 orang Pejabat Eselon III, IV dan pejabat fungsional lingkup BPSDMP.

#### **1.3.4.4. Aspek Evaluasi dan Pelaporan**

- Terbitnya pedoman monitoring, evaluasi dan pelaporan serta pedoman pelaksanaan Pengendalian Intern lingkup BPSDMP setiap tahun.
- Terpublikasikan informasi program dan kegiatan BPSDMP melalui leaflet (2.000 eksemplar), majalah dinding, DVD (120 keping), siaran televisi (14 kali), konferensi pers (7 kali), kunjungan Pers (11 kali), dan pameran (18 kali).
- Tersusunnya Laporan Monitoring dan Evaluasi Program/Kegiatan BPSDMP, Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) dan Laporan Tahunan BPSDMP setiap tahun.
- Terbentuknya 20 Satuan Pelaksana (Satlak) Pengendalian Intern lingkup BPSDMP.

#### **1.3.5. Program Koordinatif**

##### **1.3.5.1. Fasilitasi Pengembangan Kawasan Agropolitan**

Pengembangan kawasan Agropolitan merupakan program pemberdayaan masyarakat tani berbasis agribisnis melalui pendekatan

pengembangan kawasan yang ditangani Tim Nasional Pengembangan Agropolitan, yang terdiri atas Departemen Pekerjaan Umum, Departemen Dalam Negeri, Departemen Pertanian dan Pemerintah Daerah. Hasil yang dicapai terkait dengan pengembangan kawasan agropolitan adalah sebagai berikut.

- Tersusunnya Pedoman Umum Pengembangan Kawasan Agropolitan yang disempurnakan.
- Terlaksananya pertemuan Pemantapan Pengembangan Kawasan Agropolitan yang diikuti oleh 3 Departemen terkait.
- Terlaksananya pembinaan kawasan Agropolitan di 33 Provinsi.

#### **1.3.5.2. Fasilitas Pemberdayaan Lembaga Mandiri yang Mengakar di Masyarakat (LM3)**

Program pengembangan agribisnis di LM3 merupakan salah satu upaya pemberdayaan masyarakat tani yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas kelembagaan keagamaan atau budaya dalam membina kegiatan agribisnis masyarakat di sekitarnya. Komponen kegiatan terdiri atas pemberdayaan lembaga dan pemberian bantuan sosial untuk pengembangan usaha dan kapasitas lembaga. BPSDMP bertanggung jawab dalam koordinasi, pelatihan dan pembinaan, pengelolaan database, dan penguatan jejaring kerjasama. antar LM3.

Hasil yang telah dicapai sebagai berikut.

- Tersusun dan terdistribusikannya Pedoman Umum Pemberdayaan LM3.
- Tersusunnya Modul Pelatihan bagi Pengelola LM3 dan Pendamping LM3.

- Tersusunnya profil dan database LM3.
- Terselenggaranya Silaturahmi Nasional LM3 (tahun 2006 dan 2008).
- Terfasilitasinya pengembangan 60 LM3 menjadi LM3 Model.
- Terfasilitasinya pembentukan asosiasi LM3.
- Meningkatnya kompetensi 4.300 orang petugas pendamping dan 4.300 orang pengurus LM3 melalui pelatihan dan permagangan.

### **1.3.5.3. Fasilitasi Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP)**

PUAP merupakan salah satu kegiatan dari Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri yang bertujuan untuk mengurangi kemiskinan dan pengangguran. Kegiatan ini dilaksanakan sejak tahun 2008 di 10.000 desa di 33 provinsi. Komponen kegiatan terdiri dari pemberdayaan Gapoktan dan pemberian bantuan sosial untuk modal usaha bagi anggota Gapoktan.

Hasil yang telah dicapai sebagai berikut.

- Terlaksananya rekrutmen dan peningkatan kompetensi 1.009 orang Penyelia Mitra Tani (PMT).
- Meningkatnya kompetensi 22.146 orang petugas melalui TOMT, TOT, dan Pelatihan Penyuluh Pendamping.
- Meningkatnya kompetensi 30.000 orang pengurus Gapoktan melalui pelatihan.
- Terlaksananya pemberian penghargaan bagi pengurus Gapoktan pengelola PUAP dari 33 provinsi.

### **1.3.6. Program dengan Dana PHLN**

#### **1.3.6.1. Program Pemberdayaan Petani melalui Teknologi Informasi Pertanian/ P3TIP (*Farmers Empowerment through Agricultural Technology and Information/ FEATI*)**

P3TIP merupakan program pemberdayaan dengan tujuan untuk mengembangkan penyuluhan pertanian yang berorientasi pasar, yang dibangun berdasarkan kemitraan yang sejajar antara petani, pemerintah dan pihak swasta. Program ini dilaksanakan mulai tahun 2007 sampai dengan 2011 di 18 provinsi, 68 kabupaten, 3.080 desa, dengan jumlah total pinjaman dari Bank Dunia sebesar USD 92,8 juta. P3TIP memiliki lima komponen, tiga diantaranya dikelola oleh BPSDMP, yaitu 1) penguatan penyuluhan yang sesuai dengan kebutuhan petani, 2) penguatan kelembagaan penyuluhan dan peningkatan kapasitas aparat/petugas penyelenggara penyuluhan pertanian, serta 3) dukungan kebijakan penyuluhan dan penyelenggaraan program.

Hasil yang telah dicapai oleh P3TIP sebagai berikut.

- Terbentuknya 3.080 Unit Pengelola *Farmer Managed Extension Activities* (UP-FMA) dan terbinanya 6.160 penyuluh swadaya.
- Meningkatnya kompetensi penyuluh pertanian melalui: (1) pelatihan teknis spesifik lokalita sebanyak 4.668 orang; (2) Pelatihan Manajemen Agribisnis bagi pelatih dan penyuluh pendamping sebanyak 1.086 orang; serta (3) Pelatihan Metodologi Penyuluhan Partisipatif dan fasilitasi FMA bagi pelatih dan penyuluh pendamping sebanyak 3.358 orang.
- Meningkatnya kompetensi 9.540 orang.pengelola UP-FMA.
- Meningkatnya kompetensi 6.360 orang penyuluh swadaya.

- Tersalurkannya dana hibah sebesar Rp.107 milyar dalam rangka pembelajaran agribisnis (FMA) bagi 243.989 orang petani.
- Terfasilitasinya pembangunan 472 unit BPP baru dan rehabilitasi 109 unit gedung BPP lama.

### **1.3.6.2. Program Pemberdayaan Masyarakat Pedesaan dalam Pembangunan Pertanian (*Rural Empowerment on Agriculture Development/ READ*)**

Program READ merupakan program pemberdayaan masyarakat tani yang dibiayai dengan pinjaman IFAD sebesar SDR 14.30 juta atau sekitar USD 21.08 juta, dan dilaksanakan di lima Kabupaten di Provinsi Sulawesi Tengah. Program READ efektif pada tanggal 19 November 2008. Realisasi kegiatan dimulai pada tahun anggaran 2009 dan akan berakhir pada tahun 2014. Program ini terdiri dari empat komponen yang tiga di antaranya dikelola oleh BPSDMP, yaitu: 1) pemberdayaan masyarakat, 2) pengembangan usaha pertanian budidaya dan non budidaya, 3) pembangunan prasarana pedesaan.

Hasil yang telah dicapai melalui Program READ adalah sebagai berikut.

- Terfasilitasinya pembentukan 20 Unit Pengelola Dana Desa (UPDD).
- Terfasilitasinya pembentukan 180 kelompok (97 kelompok pria, 8 kelompok wanita, dan 75 kelompok campuran), dengan jumlah anggota 4.383 orang.
- Terfasilitasinya pembangunan dan rehabilitasi infrastruktur pedesaan, yaitu: 1) jalan desa baru 11,3 km, 2) jalan desa direhabilitasi 3 km, 3) jalan usaha tani baru 60,9 km, 4) jaringan

irigasi baru 8 ha, 5) saluran drainase baru 1.484 m, 6) sarana MCK 41 buah, 7) tanggul 2.650 m, dan 8) sarana air bersih 32 unit.

### **1.3.6.3. Kegiatan dengan Sumber Dana CF-SKR**

Program pemberdayaan yang bersumber dari bantuan hibah CF-SKR sebesar Rp. 24 milyar adalah kegiatan pemberdayaan kelompok tani korban gempa dan pengembangan P4S yang dilaksanakan pada tahun 2006, 2008, dan 2009. Komponen kegiatan terdiri dari pelatihan, permagangan, pendampingan, serta penguatan kelembagaan dan bantuan modal usahatani.

Hasil yang telah dicapai sebagai berikut.

- Meningkatnya kompetensi perencanaan usahatani bagi 960 pengurus kelompok tani korban gempa di DI Yogyakarta, Jawa Tengah, Sumatera Barat dan Jambi.
- Terasilinasinya 960 kelompok tani untuk memperoleh dana bantuan modal usahatani dan non usahatani sejumlah Rp. 15,6 milyar.
- Meningkatnya kompetensi 180 orang instruktur, manager dan pengelola P4S melalui TOT.
- Meningkatnya kompetensi 120 orang pengelola P4S melalui magang.
- Meningkatnya kompetensi 1.800 orang petani melalui pelatihan di 30 P4S.
- Terasilinasinya pengadaan sarana pelatihan bagi 30 P4S.
- Terasilinasinya 1.800 orang petani dan pengelola P4S melalui bantuan penguatan modal sejumlah Rp. 3,4 milyar.

## **1.4. Permasalahan, Lingkungan Strategis, dan Tantangan**

### **1.4.1. Permasalahan**

Permasalahan yang dihadapi sektor pertanian dibedakan menjadi permasalahan umum sektor pertanian dan permasalahan yang terkait dengan SDM pertanian. Permasalahan umum sektor pertanian antara lain: perubahan iklim global, laju pertumbuhan penduduk, konversi lahan, terbatasnya infrastruktur pertanian, dan pola konsumsi pangan yang didominasi oleh beras. Sedangkan permasalahan yang terkait dengan SDM pertanian mencakup permasalahan pada aspek penyuluhan, pelatihan dan pendidikan pertanian, serta administrasi dan manajemen.

#### **1.4.1.1. Permasalahan umum sektor pertanian**

- Perubahan iklim yang berdampak pada bergesernya pola dan kalender tanam, perubahan keanekaragaman hayati, eksplosi hama dan penyakit tanaman dan hewan, serta penurunan produksi pertanian.
- Laju pertumbuhan penduduk yang kurang diimbangi oleh penyediaan lapangan kerja berdampak pada pengangguran, kemiskinan, dan rendahnya pendapatan, sehingga menyebabkan daya beli rendah. Laju pertumbuhan penduduk juga berdampak pada meningkatnya kebutuhan konsumsi.
- Pola konsumsi pangan masyarakat masih didominasi oleh beras, sehingga mengancam ketahanan pangan nasional.

- Konversi lahan pertanian terutama lahan sawah menjadi lahan non pertanian menyebabkan kapasitas produksi pangan menurun, degradasi agroekosistem dan semakin sempitnya luas garapan usahatani.
- Terbatasnya prasarana sarana pertanian yang mencakup jaringan irigasi, jalan usaha tani, jalan produksi, pos dan laboratorium perkarantinaan, fasilitas penangkaran benih dan bibit, klinik konsultasi kesehatan tanaman dan hewan, serta pasar pertanian.

#### **1.4.1.2. Permasalahan Penyuluhan Pertanian**

- Pola pikir dan perilaku petani masih berorientasi pada aspek produksi daripada mutu, sehingga harga yang diterima petani masih relatif rendah.
- Rendahnya kemandirian dan lemahnya akses petani terhadap modal, teknologi, sarana produksi, dan informasi pasar.
- Lemahnya kapasitas kelembagaan petani, baik sebagai kelembagaan ekonomi maupun kelembagaan pelatihan/permagangan.
- Belum semua pemerintah provinsi dan kabupaten/kota memiliki kelembagaan penyuluhan sebagaimana dimaksud Undang Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang SP3K.
- Jumlah dan kompetensi penyuluh yang belum memadai untuk mendukung empat sukses pembangunan pertanian, mengantisipasi perubahan iklim dan menjaga kelestarian lingkungan hidup.
- Program penyuluhan yang disusun bersama instansi terkait dan pelaku utama belum sepenuhnya dilaksanakan di lapangan.

- Dukungan dana yang terbatas bagi pelaksanaan kaji terap dan diseminasi teknologi oleh penyuluh pertanian di lapangan.

#### **1.4.1.3. Permasalahan Pelatihan Pertanian**

- Diklat Pimpinan belum dijadikan dasar dalam pengisian jabatan struktural di lingkup Kementerian Pertanian.
- Belum semua eselon I dan instansi terkait lingkup pertanian memanfaatkan lembaga diklat pertanian dalam peningkatan kompetensi kerja aparatur pertanian.
- Jumlah dan kompetensi widyaiswara belum memadai untuk melaksanakan diklat teknis yang dibutuhkan oleh eselon I dan instansi terkait lingkup pertanian.
- Sarana dan prasarana diklat pertanian belum memadai untuk melaksanakan diklat teknis dan kewirausahaan agribisnis.
- Dukungan anggaran untuk penyelenggaraan pelatihan di lembaga diklat pertanian sangat terbatas untuk memenuhi kebutuhan pelatihan yang diusulkan oleh eselon I dan instansi terkait lingkup pertanian.

#### **1.4.1.4 Permasalahan Pendidikan Pertanian**

- Belum semua Badan Kepegawaian Daerah (BKD) memahami bahwa Diploma IV (D-IV) setara Strata 1 (S1).
- Kurangnya dukungan pemerintah daerah kepada penyuluh pertanian untuk mengikuti pendidikan di STPP.

- STPP yang merupakan perguruan tinggi kedinasan pertanian belum dapat melayani kebutuhan tenaga fungsional RIHP non penyuluh pertanian.
- Jumlah dan kompetensi dosen sekolah tinggi fungsional pertanian untuk bidang RIHP non penyuluh pertanian masih terbatas.
- Sarana dan prasarana yang STPP belum memadai.
- Dukungan anggaran untuk penyelenggaraan pendidikan pertanian di STPP masih terbatas.
- Menurunnya minat generasi muda untuk mengikuti pendidikan menengah kejuruan pertanian.
- Jumlah dan kompetensi guru SMK-PP belum memadai
- Sarana dan prasarana yang dimiliki SMK-PP belum memadai.
- Tindak lanjut MOU antara Kementerian Pertanian dengan Kementerian Pendidikan Nasional belum sepenuhnya diimplementasikan di lapangan.

#### **1.4.1.5. Permasalahan Administrasi dan Manajemen**

- Mekanisme perencanaan dan revisi DIPA belum sesuai dengan sistem dan prosedur.
- Peraturan perundangan dan organisasi belum sepenuhnya tertangani dengan baik.
- Penanganan aset-aset yang bermasalah di lingkup Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian belum sepenuhnya terselesaikan.

- Penyampaian laporan bulanan kegiatan dengan sumber dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan belum berjalan dengan baik.
- Sistem Pengendalian Intern (SPI) belum sepenuhnya dilaksanakan dengan baik oleh unit satuan kerja lingkup BPSDMP.
- Penanganan tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK, BPKP dan Inspektorat Jenderal belum terselesaikan dengan baik.

#### **1.4.2. Tantangan**

Mengacu pada permasalahan, perkembangan lingkungan strategis, maka tantangan penyuluhan dan pengembangan SDM pertanian yang dihadapi dimasa mendatang adalah sebagai berikut:

- Kebutuhan dan harga pangan serta energi yang cenderung meningkat.
- Terjadinya perubahan iklim dan isu kelestarian lingkungan hidup.
- Adanya keragaman kebijakan pemerintah provinsi dan kabupaten/kota, yang berpengaruh negatif terhadap implementasi kebijakan dan program pengembangan SDM pertanian.
- Meningkatnya tuntutan daya saing bagi masyarakat tani di pasar regional dan pasar global.

- Tuntutan perubahan pola pikir dan perilaku petani, dari petani subsisten tradisional menjadi petani modern, mandiri dan berwawasan agribisnis.
- Adanya kebutuhan akan kelembagaan ekonomi perdesaan yang tangguh dan mandiri dalam rangka meningkatkan daya saing dan posisi tawar petani.
- Adanya tuntutan ketersediaan aparatur pertanian yang kompeten untuk mendukung pencapaian empat sukses pembangunan pertanian.
- Adanya tuntutan reformasi birokrasi untuk mewujudkan tatakelola pemerintahan yang baik dan pemerintah yang bersih.



## **BAB II**

### **VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN**

#### **2.1. Visi**

BPPSDMP memiliki tugas melaksanakan penyuluhan dan pengembangan sumberdaya manusia pertanian sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dalam melaksanakan tugas tersebut, BPPSDMP menyelenggarakan fungsi: a) penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program penyuluhan, pendidikan dan pelatihan, standardisasi dan sertifikasi sumberdaya manusia pertanian sesuai dengan peraturan perundang-undangan; b) pelaksanaan penyuluhan, pendidikan dan pelatihan, standardisasi dan sertifikasi sumberdaya pertanian sesuai dengan peraturan perundang-undangan; c) pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penyuluhan, pendidikan dan pelatihan, standardisasi dan sertifikasi sumberdaya manusia pertanian sesuai dengan peraturan perundang-undangan; serta d) pelaksanaan administrasi BPPSDMP.

Sesuai tugas dan fungsi, potensi, capaian hasil pada periode sebelumnya, permasalahan, dan tantangan yang ada, BPPSDMP pada periode 2010-2014 menetapkan visi, yaitu **“Terwujudnya sumberdaya manusia pertanian yang profesional, kreatif, inovatif dan berwawasan global dalam rangka meningkatkan kemandirian pangan, nilai tambah, ekspor, dan kesejahteraan petani.”**

## **2.2. Misi**

Untuk mewujudkan visi di atas, BPPSDMP menetapkan misi sebagai berikut.

- 1) Memantapkan sistem penyuluhan pertanian yang komprehensif dan terpadu.
- 2) Memantapkan sistem pelatihan pertanian yang berbasis kompetensi.
- 3) Merevitalisasi sistem pendidikan, standardisasi dan sertifikasi profesi pertanian yang kredibel.
- 4) Memantapkan sistem administrasi dan manajemen yang transparan dan akuntabel.

## **2.3. Tujuan dan Sasaran**

### **2.3.1. Tujuan**

Sejalan dengan visi dan misi yang telah ditetapkan, tujuan yang hendak dicapai BPPSDMP adalah sebagai berikut.

- 1) Menumbuhkembangkan kelembagaan petani untuk meningkatkan kompetensi dan kemandirian petani.
- 2) Meningkatkan kompetensi kerja aparatur dan kompetensi non aparatur pertanian.
- 3) Menghasilkan aparatur dan non aparatur yang kompeten dan tersertifikasi.
- 4) Meningkatkan pelayanan, tata kelola administrasi dan manajemen yang efektif, efisien dan akuntabel.

### **2.3.2. Sasaran Strategis**

Sasaran strategis yang ingin dicapai BPPSDMP dalam kurun waktu 2010-2014 adalah:

- 1) Tumbuhkembangnya 3.283 kelembagaan penyuluhan pemerintah dan 28.304 kelembagaan petani.
- 2) Meningkatnya kapasitas 111.997 orang aparatur pertanian dan 97.814 orang non aparatur.
- 3) Berkembangnya 29 kelembagaan pelatihan pemerintah dan 891 kelembagaan pelatihan petani.
- 4) Meningkatnya kompetensi dan kualifikasi pendidikan 3.500 orang aparatur pertanian, 70.000 orang non aparatur dan 5.000 orang SDM pertanian yang tersertifikasi.
- 5) Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi dan teknis bagi 130 Satuan Kerja (Satker) dalam mendukung terwujudnya laporan Sistem Akutansi Instansi (SAI) Badan PPSDMP yang akuntabel.

Sasaran strategis tersebut lebih lanjut dijabarkan sebagai berikut.

#### **2.3.2.1. Penyuluhan Pertanian**

- 1) Tersusunnya 5 program penyuluhan pertanian nasional.
- 2) Tersusunnya 25 Pedoman Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian yang sesuai kebutuhan pelaku utama dan pelaku usaha.

- 3) Tersusunnya rencana kegiatan Pengembangan Penyuluhan Pertanian sesuai kebutuhan pelaku utama dan pelaku usaha setiap tahun.
- 4) Tersedianya 9 peraturan perundang-undangan sebagai tindak lanjut dari UU No.16/2006.
- 5) Tersedia dan terdistribusikannya materi Penyuluhan Pertanian dalam bentuk tercetak (brosur, folder, leaflet, majalah, poster, dll), elektronik (*cyber extension*, televisi, dan radio).
- 6) Terlaksananya Apresiasi Sistem Informasi Penyuluhan Pertanian bidang ketenagaan, kelembagaan penyuluh, kelembagaan tani setiap tahun.
- 7) Tersusunnya hasil evaluasi penyelenggaraan penyuluhan pertanian di 33 provinsi setiap tahun.
- 8) Terjalinnya 15 kerjasama penyuluhan pertanian dalam dan luar negeri.
- 9) Tersedianya perlengkapan alat pengolah data *Cyber Extension* untuk 2.500 BPP.
- 10) Tersedianya data dan profil Kelembagaan dan Ketenagaan Penyuluhan Pertanian setiap tahun.
- 11) Berdayanya kelembagaan penyuluhan di 33 provinsi dan 250 kabupaten/kota.
- 12) Berdayanya Kelembagaan Penyuluhan di 3.000 Kecamatan dan 28.304 Desa/Kelurahan.
- 13) Berdayanya 522 Balai Penyuluhan Model.
- 14) Berfungsinya 28.304 Pos Penyuluhan Desa (Posluhdes).
- 15) Diterimanya honorarium dan BOP oleh 24.608 THL-TB Penyuluh Pertanian setiap tahun.

- 16) Diterimanya BOP oleh 27.922 Penyuluh Pertanian PNS setiap tahun.
- 17) Terfasilitasinya pemberdayaan bagi 330 Penyuluh Pertanian Swadaya/Swasta.
- 18) Terfasilitasinya kegiatan komisi Penyuluhan Pertanian tingkat nasional, 33 provinsi, dan 524 kabupaten/kota.
- 19) Tersedianya data dan profil Kelembagaan Petani dan Usaha Tani setiap tahun.
- 20) Pemberdayaan bagi 28.304 kelembagaan petani dan usaha tani (Gapoktan).
- 21) Terselenggaranya Apresiasi Manajemen Agribisnis bagi 1.000 Gapoktan.
- 22) Berkembangnya 300 Gapoktan menjadi Kelembagaan Ekonomi Perdesaan.
- 23) Terwujudnya 3.000 Usahatani kelompok Berbasis Komoditas Unggulan Perdesaan.
- 24) Terselenggaranya penyuluhan yang dikelola oleh petani di 68 kabupaten pada 18 provinsi sasaran FEATI.

#### **2.3.2.2. Pelatihan Pertanian**

- 1) Meningkatnya eselonering 2 UPT Pelatihan Pusat; penataan 10 UPT Pelatihan Pusat dan 19 UPT Pelatihan Daerah; serta akreditasi 65 program pelatihan pada UPT Pelatihan Pusat/Daerah.
- 2) Tertata dan terklasifikasinya 891 kelembagaan P4S.
- 3) Terstandardisasinya sarana prasarana di 10 UPT Pelatihan Pusat.

- 4) Meningkatnya profesionalisme 290 widyaiswara dan 790 tenaga teknis kediklatan pada UPT Pelatihan pusat dan daerah.
- 5) Meningkatnya kompetensi 1.792 orang instruktur P4S.
- 6) Terbitnya 21 pedoman dan materi pelatihan untuk mendukung 4 (empat) sukses pembangunan pertanian.
- 7) Meningkatnya kompetensi 108.825 orang aparatur melalui pelatihan pertanian yang mendukung 4 (empat) sukses pembangunan pertanian, reformasi birokrasi, mengantisipasi perubahan iklim dan kelestarian lingkungan, serta responsif gender.
- 8) Meningkatnya kompetensi 97.814 orang non aparatur melalui pelatihan dan permagangan pertanian yang mendukung 4 (empat) sukses pembangunan pertanian, antisipatif terhadap perubahan iklim dan kelestarian lingkungan, serta responsif gender.
- 9) Tersusunnya hasil evaluasi penyelenggaraan pelatihan di 10 UPT Pelatihan Pusat dan 19 UPT Pelatihan Daerah.
- 10) Ditetapkannya 14 program pelatihan yang terintegrasi dengan program instansi terkait setiap tahun.
- 11) Terasilitasinya 300 orang widyaiswara/tenaga ahli, petani yang mengikuti pelatihan/permagangan bertaraf nasional dan internasional.
- 12) Berdayanya masyarakat dan pembangunan pertanian di 150 desa pada 5 kabupaten READ di Sulawesi Tengah.

### **2.3.2.3. Pendidikan, serta Standardisasi dan Sertifikasi Profesi Pertanian**

- 1) Terbitnya Keputusan Ketua Badan Akreditasi Nasional (BAN) tentang Peringkat Akreditasi 10 Program Studi di STPP.
- 2) Terselenggaranya 5 Program Studi baru Bidang RIHP dan 2 Program Studi Perkarantinaaan.
- 3) Meningkatnya status kelembagaan 10 SMK PP menjadi Rintisan SMK-PP bertaraf internasional.
- 4) Terbitnya satu Peraturan Mentan tentang Perubahan Nomenklatur SPP menjadi Sekolah Menengah Kejuruan Pertanian Pembangunan (SMK-PP).
- 5) Terbitnya satu Peraturan Kepala Badan PPSDMP tentang Standardisasi sarana dan prasarana pendidikan pertanian.
- 6) Tumbuh dan berkembangnya 10 unit usaha agribisnis di Rintisan SMK-PP bertaraf internasional.
- 7) Penetapan Standar pendidik dan tenaga kependidikan di SMK PP dan STPP.
- 8) Terasilinasinya sertifikasi 210 dosen, 300 guru SMK PP dan 300 tenaga kependidikan.
- 9) Dihilkannya 2.500 Sarjana Sain Terapan bidang RIHP serta perkarantinaaan pertanian.
- 10) Meningkatnya mutu pengelolaan di 71 SMK-PP.
- 11) Dihilkannya 33.000 lulusan SMK-PP sebagai teknisi menengah pertanian yang kompeten dan calon wirausahawan muda pertanian yang mandiri.

- 12) Terselenggaranya 15 kerjasama teknis pendidikan, standardisasi dan sertifikasi profesi pertanian dengan dunia usaha/dunia industri, lembaga pendidikan dan lembaga lain yang terkait.
- 13) Terkirimnya 30 siswa SMK-PP untuk mengikuti pertukaran siswa di sekolah pertanian di luar negeri.
- 14) Terkirimnya 60 lulusan SMK-PP untuk magang di perusahaan agribisnis di luar negeri.
- 15) Meningkatnya jenjang pendidikan formal bagi 1.000 aparatur pertanian.
- 16) Terbentuknya 10 LSP bidang pertanian.
- 17) Tersedianya 300 orang asessor kompetensi bidang pertanian.
- 18) Terakreditasinya 10 UPT Pelatihan Pertanian Pusat sebagai LDP.
- 19) Terakreditasinya 25 TUK bidang pertanian.
- 20) Tersusunnya 30 SKKNI bidang pertanian sesuai standar internasional.

#### **2.3.2.4. Dukungan Administrasi Manajemen dan Teknis Lainnya**

- 1) Tertatanya organisasi pusat dan 19 UPT Pusat, terselesaikannya 1.250 produk hukum dan terkelolanya 5.325 dokumen administrasi kepegawaian.
- 2) Tersusunnya 10 dokumen data SDM dan ketenagakerjaan pertanian, 10 dokumen kerjasama dalam dan luar negeri, serta terstrukturisasinya program, kegiatan dan anggaran berbasis kinerja untuk 130 Satuan Kerja setiap tahun.
- 3) Tersusunnya 5 dokumen laporan SAI dan terselesaikannya masalah aset pada 7 UPT.
- 4) Terevaluasinya pelaksanaan program dan kegiatan di 130 satker BPPSDMP, berfungsinya Sistem Pengendalian Intern (SPI) di pusat dan 19 UPT Pusat, serta terselesaikannya 90% tindak lanjut LHP.
- 5) Tersedianya 375 materi kehumasan dan terpenuhinya 85% kebutuhan referensi di BPPSDMP.

## **BAB III**

### **ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, PROGRAM DAN KEGIATAN, SERTA INDIKATOR**

#### **3.1. Arah Kebijakan**

Empat target utama pembangunan pertanian Kementerian Pertanian tahun 2010 – 2014, yaitu: 1) Pencapaian swasembada dan swasembada berkelanjutan; 2) Peningkatan diversifikasi pangan; 3) Peningkatan nilai tambah, daya saing dan ekspor; serta 4) Peningkatan kesejahteraan petani. Kementerian Pertanian telah menetapkan 23 point arah kebijakan untuk mencapai sasaran tersebut, dimana beberapa di antaranya terkait dengan pengembangan penyuluhan dan kelembagaan petani.

Selanjutnya, dalam rangka percepatan perluasan pembangunan ekonomi Indonesia, Pemerintah telah menetapkan tiga strategi utama pembangunan ekonomi nasional, yaitu: 1) mengembangkan koridor ekonomi Indonesia; 2) memperkuat konektivitas nasional; serta 3) mempercepat kemampuan iptek nasional.

Khusus untuk pengembangan koridor ekonomi Indonesia, Pemerintah telah menetapkan enam Pembangunan Koridor Ekonomi (PKE) yang memiliki fungsi strategis untuk menghasilkan dampak ekonomi nasional khususnya industri unggulan daerah dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional dari 5,3% menjadi 7% per tahun. Enam KPE tersebut adalah koridor: (a) Sumatera sebagai Sentra Produksi dan Pengolahan Hasil Bumi dan Lumbung Energi Nasional; (b) Jawa sebagai pendorong Industri dan jasa nasional; (c) Kalimantan sebagai pusat produksi dan pengolahan

hasil tambang dan lumbung energi nasional; (d) Sulawesi dan Maluku Utara sebagai pusat produksi dan pengolahan hasil pertanian, perkebunan, dan perikanan nasional; (e) Bali dan Nusa Tenggara sebagai pintu gerbang pariwisata dan pendukung pangan nasional, (f) Papua dan Maluku sebagai pusat pengolahan sumberdaya alam yang melimpah dan SDM yang sejahtera.

Kementerian Pertanian menindaklanjuti pengembangan enam koridor ekonomi tersebut, dengan mengarahkan pembangunan pertanian pada masing-masing koridor ekonomi sebagai berikut: (a) Sumatera sebagai Sentra Produksi Kelapa Sawit dan Karet; (b) Jawa sebagai Sentra Pengembangan Industri Makanan/Pangan; (c) Kalimantan sebagai Sentra Produksi Kelapa Sawit dan Karet; (d) Sulawesi sebagai Pusat Produksi Beras, Singkong, Jagung dan Kakao; (e) Bali-NTB-NTT sebagai Sentra Produksi Jagung, Kedelai; (f) Papua sebagai Sentra Produksi Pangan dan Perkebunan.

Mengacu pada arah kebijakan Kementerian Pertanian dan enam koridor utama di atas, maka kebijakan penyuluhan dan pengembangan SDM pertanian diarahkan pada:

1. Pemantapan sistem penyuluhan pertanian untuk meningkatkan kompetensi penyuluh yang bersifat polivalen di tingkat desa dan spesialis di tingkat kabupaten/kota, provinsi, dan pusat.
2. Penempatan satu penyuluh satu desa untuk mendukung komoditas unggulan.
3. Pemantapan sistem pelatihan pertanian berbasis kompetensi dan mendukung pencapaian target utama pembangunan pertanian.

4. Penguatan kelembagaan pelatihan pertanian pemerintah dan kelembagaan pelatihan petani sebagai pusat pembelajaran yang andal dan mandiri.
5. Pengembangan kualitas pendidikan tinggi kedinasan pertanian yang mampu menghasilkan tenaga fungsional RIHP dan tenaga Karantina Pertanian yang profesional dan kompeten.
6. Meningkatkan kualitas pendidikan menengah pertanian yang mampu menghasilkan tenaga teknis pertanian tingkat menengah dan wirausahawan muda pertanian.
7. Mengembangkan sistem standardisasi dan sertifikasi profesi pertanian untuk memenuhi kebutuhan SDM pertanian yang profesional dan kompeten.
8. Pemantapan sistem administrasi dan manajemen untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan pemerintahan yang bersih.

## **3.2 Strategi**

Mengacu pada strategi pembangunan pertanian, serta arah kebijakan penyuluhan dan pengembangan SDM pertanian, maka strategi untuk mencapai visi dan misi BPPSDMP pada periode 2010-2014 adalah sebagai berikut.

1. Penataan dan penguatan kelembagaan penyuluhan dan kelembagaan petani mulai dari tingkat desa sampai tingkat pusat.

2. Pengembangan program dan sistem informasi penyuluhan pertanian yang mendukung empat sukses pembangunan pertanian sertaantisipasi perubahan iklim dan kelestarian lingkungan.
3. Penataan serta peningkatan jumlah dan kompetensi penyuluh pertanian melalui optimalisasi peran penyuluh PNS, penyuluh Swadaya, dan penyuluh Swasta.
4. Penataan dan pengembangan usaha tani yang mandiri dan berdayasaing.
5. Penataan serta peningkatan kompetensi THL TB Penyuluh Pertanian.
6. Peningkatan jumlah dan kompetensi ketenagaan pelatihan pertanian yang profesional dan kredibel.
7. Peningkatan jumlah dan mutu penyelenggaraan pelatihan aparatur dan non aparatur pertanian.
8. Peningkatan jumlah dan mutu sarana dan prasarana kelembagaan pelatihan pertanian.
9. Akreditasi kelembagaan pelatihan pertanian pemerintah dan pelatihan petani (P4S).
10. Restrukturisasi kelembagaan dan pengembangan program studi pendidikan tinggi kedinasan pertanian.
11. Pengembangan kelembagaan pendidikan menengah kejuruan pertanian.
12. Penumbuhkembangan wirausahawan muda di bidang pertanian.

13. Pengembangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) bidang pertanian.
14. Pengembangan Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) bidang pertanian.
15. Pemantapan tata kelola organisasi dan kepegawaian.
16. Pemantapan sistem perencanaan.
17. Pemantapan sistem pengelolaan keuangan dan perlengkapan.
18. Pemantapan sistem pengendalian, evaluasi, pelaporan, dan kehumasan.

### **3.3. Program dan Kegiatan**

#### **3.3.1. Program**

Program BPPSDMP pada periode 2010-2014 adalah **“Pengembangan Sumberdaya Manusia Pertanian dan Kelembagaan Petani”**.

Pelaksanaan program tersebut dijabarkan dalam bentuk kegiatan-kegiatan seperti di bawah ini.

#### **3.3.2. Kegiatan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian**

Implementasi dari program BPPSDMP tersebut dilakukan melalui empat kegiatan sebagai berikut.

- 1) Pemantapan Sistem Penyuluhan Pertanian.
- 2) Pemantapan Sistem Pelatihan Pertanian.

- 3) Revitalisasi Sistem Pendidikan, serta Standardisasi dan Sertifikasi Profesi Pertanian.
- 4) Dukungan Administrasi Manajemen dan Teknis Lainnya.

### **3.3.2.1. Pemantapan Sistem Penyuluhan Pertanian**

Kegiatan pemantapan sistem penyuluhan pertanian meliputi: pengembangan program dan informasi penyuluhan pertanian; pengembangan kelembagaan dan ketenagaan penyuluhan pertanian; pemberdayaan kelembagaan petani dan usahatani; serta P3TIP/FEATI.

#### **3.3.2.1.1. Pengembangan Program dan Informasi Penyuluhan Pertanian**

Pengembangan Program dan Informasi Penyuluhan Pertanian terdiri atas:

- Penyusunan program dan pengembangan program penyuluhan.
- Pengembangan program kerja Pusat Penyuluhan Pertanian.
- Fasilitasi penyelesaian peraturan perundang-undangan.
- Penyusunan dan penyebaran materi penyuluhan pertanian.
- Apresiasi sistem informasi penyuluhan pertanian.
- Evaluasi penyelenggaraan penyuluhan pertanian.
- Pengembangan kerjasama dalam dan luar negeri.
- Pengadaan perlengkapan alat pengolah data penyuluhan pertanian.

#### 3.3.2.1.2. Pengembangan Kelembagaan dan Ketenagaan Penyuluhan Pertanian

Pengembangan Kelembagaan dan Ketenagaan Penyuluhan Pertanian akan difokuskan pada hal-hal sebagai berikut:

- Pengembangan data base dan profil kelembagaan dan ketenagaan penyuluhan pertanian.
- Fasilitasi Pemberdayaan Kelembagaan Penyuluhan Pertanian Tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota.
- Pemberdayaan Kelembagaan Penyuluhan Pertanian Tingkat Kecamatan dan Desa/Kelurahan.
- Fasilitasi Pemberdayaan THL-TB Penyuluh Pertanian.
- Fasilitasi Pengembangan Profesionalisme Penyuluh Pertanian.
- Fasilitasi Pemberdayaan Penyuluh Pertanian Swadaya/Swasta.
- Fasilitasi Komisi Penyuluhan Pertanian.

#### 3.3.2.1.3. Pemberdayaan Kelembagaan Petani dan Usahatani

Pemberdayaan Kelembagaan Petani dan Usahatani diarahkan pada kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

- Pengembangan Data dan Profil Kelembagaan Petani dan Usahatani.
- Fasilitasi Pemberdayaan Kelembagaan Petani dan Usahatani.
- Apresiasi Manajemen Agribisnis bagi Gapoktan.
- Pengembangan Gapoktan menjadi Kelembagaan Ekonomi Perdesaan.

- Fasilitasi Pengembangan Usahatani kelompok Berbasis Komoditas Unggulan Perdesaan.

3.3.2.1.4. Penyelenggaraan penyuluhan yang dikelola oleh petani akan difokuskan pada lokasi-lokasi *Farmer Empowerment Through Agricultural Technology and Informastion* (FEATI Project).

### **3.3.2.2. Pemantapan Sistem Pelatihan Pertanian**

Kegiatan pemantapan sistem pelatihan pertanian meliputi: pemantapan kelembagaan pelatihan pertanian; peningkatan ketenagaan pelatihan pertanian; peningkatan penyelenggaraan pelatihan pertanian; pengembangan program dan kerjasama pelatihan pertanian; serta READ.

#### **3.3.2.2.1. Pemantapan Kelembagaan Pelatihan Pertanian**

Pemantapan Kelembagaan Pelatihan Pertanian diarahkan untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

- Penataan kelembagaan pelatihan pertanian pusat dan daerah serta akreditasi program pelatihan pertanian.
- Penataan dan klasifikasi kelembagaan P4S.
- Pengembangan sarana dan prasarana pelatihan.

#### **3.3.2.2.2. Peningkatan Ketenagaan Pelatihan Pertanian**

Peningkatan Ketenagaan Pelatihan Pertanian meliputi kegiatan:

- Peningkatan profesionalisme widyaiswara dan tenaga teknis kediklatan.
- Peningkatan kompetensi instruktur P4S.

#### 3.3.2.2.3. Peningkatan Penyelenggaraan Pelatihan Pertanian

Peningkatan Penyelenggaraan Pelatihan Pertanian difokuskan pada kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

- Pengembangan pedoman dan materi pelatihan yang mendukung 4 (empat) sukses pembangunan pertanian
- Pengembangan pelatihan teknis agribisnis, kewirausahaan, fungsional dan struktural bagi penyuluh PNS, RIHP non penyuluh, pejabat dan petugas lainnya lingkup pertanian berbasis kompetensi kerja.
- Pengembangan pelatihan dan permagangan teknis agribisnis dan kewirausahaan berbasis kompetensi bagi penyuluh swadaya, instruktur/pengelola P4S, pengurus Gapoktan dan kelembagaan petani lainnya.
- Evaluasi penyelenggaraan pelatihan pertanian yang berkesinambungan.

#### 3.3.2.2.4. Pengembangan Program dan Kerjasama Pelatihan Pertanian

Kegiatan-kegiatan yang akan dikembangkan melalui Pengembangan Program dan Kerjasama Pelatihan Pertanian sebagai berikut:

- Peningkatan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi program pelatihan pertanian dengan instansi terkait di pusat dan daerah.
- Pengiriman widyaiswara/tenaga ahli, petani dan penyelenggaraan pelatihan pertanian dalam kerangka kerjasama dan membangun jejaring kerja dalam dan luar negeri (bilateral, regional, dan multilateral).

3.3.2.2.5. Pemberdayaan masyarakat dan pembangunan pertanian perdesaan dikembangkan melalui *Rural Empowerment and Agricultural Development Program* (Program READ).

**3.3.2.3. Revitalisasi Sistem Pendidikan serta Standardisasi dan Sertifikasi Profesi Pertanian**

**a. Pengembangan Pendidikan, Standardisasi dan Sertifikasi Profesi Pertanian**

Kegiatan pengembangan pendidikan, standardisasi dan sertifikasi profesi pertanian meliputi: peningkatan kualitas pendidikan pertanian; pengembangan program dan kerjasama pendidikan pertanian; serta pengembangan standardisasi dan sertifikasi profesi.

**3.3.2.3.1. Peningkatan Kualitas Pendidikan Pertanian**

Peningkatan Kualitas Pendidikan Pertanian akan diarahkan pada kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

- Pengembangan Kelembagaan Pendidikan Pertanian.
- Pengembangan Ketenagaan Pendidikan Pertanian
- Pengembangan Penyelenggaraan Pendidikan Pertanian.
- Pengembangan pendidikan S2 dan S3 bagi Aparatur Pertanian.

**3.3.2.3.2. Pengembangan Program dan Kerjasama Pendidikan Pertanian**

Pengembangan Program dan Kerjasama Pendidikan Pertanian meliputi kegiatan sebagai berikut:

- Peningkatan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi program pendidikan pertanian dengan instansi terkait di pusat dan daerah.
- Pengembangan kerjasama pendidikan, standardisasi dan sertifikasi profesi pertanian dengan berbagai institusi dalam dan luar negeri.

#### 3.3.2.3.5. Pengembangan Standardisasi dan Sertifikasi Profesi

Kegiatan – kegiatan dalam rangka Pengembangan Standardisasi dan Sertifikasi Profesi meliputi:

- Pembentukan dan pengembangan Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) bidang pertanian.
- Fasilitasi calon asesor kompetensi bidang pertanian.
- Akreditasi UPT Pelatihan Pertanian Pusat untuk menjadi Lembaga Diklat Profesi (LDP) dan Tempat Uji Kompetensi (TUK).
- Penyusunan SKKNI bidang pertanian dan harmonisasi dengan standar kompetensi kerja internasional.

#### b. **Pengembangan Pendidikan Menengah Pertanian**

Kegiatan pengembangan pendidikan menengah pertanian meliputi: penyelenggaraan pendidikan pertanian; pengembangan program dan kerjasama pendidikan pertanian; serta pengembangan kelembagaan dan ketenagaan.

#### 3.3.2.3.1. Pengembangan Program dan Kerjasama Pendidikan Menengah Pertanian

Pengembangan Program dan Kerjasama Pendidikan Menengah Pertanian terdiri atas:

- Peningkatan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi program pendidikan menengah pertanian
- Pengembangan kerja sama dengan instansi terkait, dunia usaha dan industri, baik di dalam dan luar negeri.

#### 3.3.2.3.2. Penataan Kelembagaan Pendidikan

Penataan Kelembagaan Pendidikan difokuskan pada kegiatan – kegiatan sebagai berikut:

- Pengembangan SMK-PP menjadi Rintisan SMK-PP bertaraf internasional.
- Penyesuaian nomenklatur SPP menjadi Sekolah Menengah Kejuruan Pertanian Pembangunan (SMK-PP).
- Standardisasi sarana dan prasarana pendidikan pertanian di SMK-PP.
- Pengembangan unit usaha agribisnis di Rintisan SMK-PP bertaraf internasional.
- Penerapan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) di SMK-PP.

#### 3.3.2.3.3. Penyelenggaraan Pendidikan Menengah Pertanian

Penyelenggaraan Pendidikan Menengah Pertanian dikembangkan melalui kegiatan sebagai berikut:

- Peningkatan mutu penyelenggaraan pendidikan menengah kejuruan pertanian di SMK-PP berdasarkan Standar Nasional Pendidikan (SNP).
- Fasilitasi Pertukaran Siswa dan Magang Alumni SMK-PP ke luar negeri.

#### 3.3.2.3.4. Peningkatan Ketenagaan Pendidikan Menengah Pertanian

Peningkatan Ketenagaan Pendidikan Menengah Pertanian meliputi kegiatan sebagai berikut:

- Standardisasi Pendidik dan Tenaga Kependidikan di SMK-PP.
- Fasilitasi Sertifikasi Guru SMK PP dan tenaga kependidikan.

#### **3.3.2.4. Dukungan Administrasi Manajemen dan Teknis Lainnya**

Kegiatan administrasi manajemen dan teknis lainnya dalam mendukung Program Pengembangan SDM Pertanian dan Kelembagaan Petani meliputi: pemantapan organisasi, ketatalaksanaan, pengelolaan kepegawaian dan ketatausahaan; pemantapan sistem perencanaan; pemantapan sistem pengelolaan keuangan dan perlengkapan; dan pemantapan sistem pengendalian, evaluasi, pelaporan, dan kehumasan. Dukungan Administrasi Manajemen dan Teknis lainnya dijabarkan sebagai berikut:zs

- 3.3.2.4.1. Pemantapan Organisasi, Ketatalaksanaan, Pengelolaan Kepegawaian dan Ketatausahaan difokuskan pada Penataan Organisasi dan Ketatalaksanaan serta Pengelolaan Administrasi Kepegawaian.
- 3.3.2.4.2. Pemantapan Sistem Perencanaan difokuskan untuk Peningkatan Kualitas Data, Perencanaan Program, Kegiatan dan Anggaran serta Kerjasama Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian.
- 3.3.2.4.3. Pemantapan Sistem Pengelolaan Keuangan dan Perlengkapan diarahkan pada Peningkatan kualitas pengelolaan administrasi keuangan dan barang milik negara.
- 3.3.2.4.4. Pemantapan Sistem Pengendalian, Evaluasi, Pelaporan, dan Kehumasan terdiri atas:
- Pengembangan sistem pengendalian, evaluasi, dan pelaporan.
  - Pengelolaan kehumasan dan perpustakaan.

### **3.4. Kegiatan dan Indikator**

Seluruh kegiatan penyuluhan dan pengembangan SDM pertanian di atas dilaksanakan secara bertahap dan berkesinambungan, sehingga pada akhir periode 2010-2014 diharapkan semua target program dan kegiatan tersebut dapat dicapai. Secara rinci kegiatan, indikator output, dan outcome kegiatan penyuluhan dan pengembangan SDM pertanian ditampilkan pada Tabel 1.

**Tabel 1.**  
**Kegiatan, Indikator Output, dan Outcome Kegiatan PPSDMP**

NO	KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR	
		OUTPUT	OUTCOME
1.	<b>Pemantapan Sistem Penyuluhan Pertanian</b>		Penyelenggaraan penyuluhan berjalan dengan baik
1.1.	<b>Pengembangan Program dan Informasi Penyuluhan Pertanian</b>		
1.1.1	Penyusunan programa Penyuluhan Pertanian Nasional	Tersusunnya 5 programa penyuluhan pertanian nasional	Terselenggaranya penyuluhan pertanian berdasarkan Program Penyuluhan Pertanian Nasional setiap tahun
1.1.2	Pengembangan program Penyuluhan Pertanian	Tersusunnya 25 Pedoman Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian yang sesuai kebutuhan pelaku utama dan pelaku usaha	Terselenggaranya pertanian yang sesuai kebutuhan pelaku utama dan pelaku usaha
		Tersusunnya rencana kegiatan Pengembangan Penyuluhan Pertanian sesuai kebutuhan pelaku utama dan pelaku usaha setiap tahun	Terlaksananya kegiatan penyuluhan pertanian di tingkat pusat dan daerah sesuai dengan rencana
1.1.3	Fasilitasi Penyelesaian Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya 9 peraturan perundang-undangan sebagai tindak lanjut dari UU No.16/2006	Terlegitimasinya penyelenggaraan penyuluhan pertanian dari tingkat pusat sampai daerah
1.1.4	Penyusunan dan penyebaran materi	Tersedia dan terdistribusikannya	Meningkatnya kinerja penyuluh dalam

NO	KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR	
		OUTPUT	OUTCOME
	Penyuluhan Pertanian	materi Penyuluhan Pertanian dalam bentuk tercetak (brosur, folder, leaflet, majalah, poster, dll), elektronik ( <i>cyber extension</i> , televisi, dan radio)	memberikan pelayanan kepada pelaku utama dan pelaku usaha
1.1.5	Apresiasi Sistem Informasi Penyuluhan Pertanian	Terlaksananya Apresiasi Sistem Informasi Penyuluhan Pertanian bidang ketenagaan, kelembagaan penyuluh, kelembagaan tani setiap tahun	Teraplikasikannya Sistem Informasi Penyuluhan Pertanian bidang ketenagaan, kelembagaan penyuluh, kelembagaan tani di 33 provinsi dan 491 kab/kota setiap tahun
1.1.6	Evaluasi Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian	Tersusunnya hasil evaluasi penyelenggaraan penyuluhan pertanian di 33 provinsi setiap tahun	Tersedianya bahan masukan untuk penyusunan rencana kegiatan penyelenggaraan penyuluhan pertanian di 33 provinsi pada tahun berikutnya
1.1.7	Pengembangan hubungan kerjasama dalam dan Luar negeri	Terjalinnya 15 kerjasama penyuluhan pertanian dalam dan luar Negeri	Meningkatnya jejaring kerjasama penyuluhan pertanian dalam dan luar negeri
1.1.8	Pengadaan perlengkapan Alat Pengolah Data <i>Cyber Extension</i>	Tersedianya perlengkapan alat pengolah data <i>Cyber Extension</i> untuk 2.500 BPP	Meningkatnya akses informasi penyuluhan pertanian oleh 2.500 BPP
<b>1.2.</b>	<b>Pengembangan Kelembagaan dan Ketenagaan Penyuluhan</b>		
1.2.1	Pengembangan Data dan Profil Kelembagaan dan Ketenagaan	Tersedianya data dan profil Kelembagaan dan Ketenagaan Penyuluhan Pertanian setiap tahun	Meningkatnya efektivitas perencanaan dan penyelenggaraan penyuluhan pertanian

NO	KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR	
		OUTPUT	OUTCOME
	Penyuluhan Pertanian		tahun berikutnya
1.2.2	Fasilitasi Pemberdayaan Kelembagaan Penyuluhan Pertanian Tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota	Berdayanya Kelembagaan Penyuluhan di 33 provinsi dan 250 kabupaten/kota	Meningkatnya efektivitas penyelenggaraan penyuluhan di 33 provinsi dan 250 kabupaten/kota
1.2.3	Pemberdayaan Kelembagaan Penyuluhan Pertanian Tingkat Kecamatan dan Desa/Kelurahan	Berdayanya Kelembagaan Penyuluhan di 3.000 Kecamatan dan 28.304 Desa/Kelurahan	Meningkatnya efektivitas penyelenggaraan Penyuluhan di 3.000 kecamatan dan 28.304 desa/kelurahan
		Berdayanya 522 BPP Model	Meningkatnya efektivitas penyelenggaraan penyuluhan di 522 kecamatan
		Berfungsinya 28.304 Posluhdes	Meningkatnya efektivitas pelayanan Posluhdes di 28.304 desa/kelurahan
1.2.4	Fasilitasi Pemberdayaan THL-TB Penyuluh Pertanian	Diterimanya honorarium dan BOP oleh 24.608 THL-TB Penyuluh Pertanian, setiap tahun	Meningkatnya kinerja 24.608 THL-TB PP
1.2.5	Fasilitasi Pengembangan Profesionalisme Penyuluh Pertanian	Diterimanya BOP oleh 27.922 Penyuluh Pertanian PNS, setiap tahun	Meningkatnya kinerja 27.922 Penyuluh Pertanian PNS
1.2.6	Fasilitasi Pemberdayaan Penyuluh Pertanian Swadaya/Swasta	Terfasilitasinya pemberdayaan bagi 330 Penyuluh Pertanian Swadaya/Swasta	Meningkatnya kompetensi dan kinerja 330 Penyuluh Pertanian Swadaya/Swasta
1.2.7	Fasilitasi Komisi Penyuluhan Pertanian	Terfasilitasinya kegiatan komisi Penyuluhan Pertanian tingkat	Tersedianya bahan masukan untuk pengambilan kebijakan

NO	KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR	
		OUTPUT	OUTCOME
		nasional, 33 provinsi, dan 524 kabupaten/kota	penyuluhan pertanian
<b>1.3.</b>	<b>Pemberdayaan Kelembagaan Petani dan Usahatani</b>		
1.3.1	Pengembangan Data dan Profil Kelembagaan Petani dan Usaha Tani	Tersedianya data dan profil Kelembagaan Petani dan Usaha Tani setiap tahun	Meningkatnya efektivitas perencanaan dan penyelenggaraan penyuluhan pertanian tahun berikutnya
1.3.2	Fasilitasi Pemberdayaan Kelembagaan Petani dan Usahatani	Pemberdayaan bagi 28.304 kelembagaan petani dan usaha tani (Gapoktan)	Meningkatnya kapasitas 28.304 kelembagaan petani dan usaha tani (Gapoktan)
1.3.3	Apresiasi Manajemen Agribisnis bagi Gapoktan	Terselenggaranya Apresiasi Manajemen Agribisnis bagi 1.000 Gapoktan	Meningkatnya kapasitas manajemen agribisnis 1.000 Gapoktan
1.3.4	Pengembangan Gapoktan menjadi Kelembagaan Ekonomi Perdesaan	Berkembangnya 300 Gapoktan menjadi Kelembagaan Ekonomi Perdesaan	Berkembangnya usaha agribisnis pada 300 Gapoktan
1.3.5	Fasilitasi Pengembangan Usahatani kelompok Berbasis Komoditas Unggulan Perdesaan	Terwujudnya 3.000 Usahatani kelompok Berbasis Komoditas Unggulan Perdesaan	Meningkatnya skala ekonomi usahatani pada 3.000 kelompok
<b>1.4.</b>	<b>FEATI</b>		
1.4.1	Penyelenggaraan penyuluhan yang dikelola oleh petani (FEATI Project)	Terselenggaranya penyuluhan yang dikelola oleh petani di 68 kabupaten pada 18 provinsi sasaran FEATI	Meningkatnya kapasitas kelembagaan petani/Gapoktan di 68 kabupaten pada 18 provinsi sasaran FEATI
<b>2.</b>	<b>Pemantapan Sistem Pelatihan Pertanian</b>		<b>Meningkatnya kompetensi kerja SDM pertanian</b>

NO	KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR	
		OUTPUT	OUTCOME
<b>2.1.</b>	<b>Pemantapan Kelembagaan Pelatihan Pertanian</b>		
2.1.1	Penataan kelembagaan pelatihan pertanian pusat dan daerah serta akreditasi program pelatihan pertanian	Meningkatnya eselonering 2 UPT Pelatihan Pusat, penataan 10 UPT Pelatihan Pusat dan 19 UPT Daerah; serta terakreditasinya 65 program pelatihan UPT Pelatihan Pusat/Daerah	Meningkatnya kredibilitas 29 kelembagaan pelatihan pertanian Pusat dan Daerah
2.1.2	Penataan dan klasifikasi kelembagaan P4S	Tertatanya dan terkalifikasinya 891 kelembagaan P4S	Meningkatnya kredibilitas 891 kelembagaan P4S
2.1.3	Pengembangan sarana dan prasarana pelatihan	Terstandarisasinya sarana dan prasarana 10 UPT pelatihan pusat	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pelatihan pertanian pada 10 UPT pelatihan pusat
<b>2.2.</b>	<b>Peningkatan Ketenagaan Pelatihan Pertanian</b>		
2.2.1	Peningkatan profesionalisme widyaiswara dan tenaga teknis kediklatan	Meningkatnya profesionalisme 290 widyaiswara dan 790 tenaga teknis kediklatan pada UPT Pelatihan pusat dan daerah	Meningkatnya kredibilitas 290 widyaiswara & 790 tenaga teknis kediklatan
2.2.2	Peningkatan kompetensi instruktur P4S	Meningkatnya kompetensi 1.792 orang instruktur P4S	Meningkatnya kredibilitas 1.792 orang instruktur P4S
<b>2.3.</b>	<b>Peningkatan Penyelenggaraan Pelatihan Pertanian</b>		
2.3.1	Pengembangan pedoman dan materi pelatihan yang mendukung 4 (empat) sukses pembangunan pertanian	Terbitnya 21 pedoman dan materi pelatihan pertanian untuk mendukung 4 (empat) sukses pembangunan pertanian	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pelatihan di 29 UPT Pelatihan Pertanian Pusat dan Daerah

NO	KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR	
		OUTPUT	OUTCOME
2.3.2	Pengembangan pelatihan teknis agribisnis, kewirausahaan, fungsional dan struktural bagi penyuluh PNS, RIHP non penyuluh, pejabat dan petugas lainnya berbasis kompetensi kerja	Meningkatnya kompetensi 108.825 orang aparatur melalui pelatihan pertanian mendukung 4 (empat) sukses pembangunan pertanian reformasi birokrasi, mengantisipasi perubahan iklim, dan kelestarian lingkungan, serta responsif gender	Meningkatnya kualitas 108.825 aparatur dalam memberikan pelayanan prima mendukung 4 (empat) sukses pembangunan pertanian reformasi birokrasi, mengantisipasi perubahan iklim, dan kelestarian lingkungan, serta responsif gender
2.3.3	Pengembangan pelatihan dan permagangan teknis agribisnis dan kewirausahaan berbasis kompetensi bagi penyuluh swadaya, instruktur/ pengelola P4S, pengurus Gapoktan dan kelembagaan petani lainnya	Meningkatnya kompetensi bagi 97.814 orang non aparatur melalui pelatihan dan permagangan pertanian yang mendukung 4 (empat) sukses pembangunan pertanian, mengantisipasi perubahan iklim, dan kelestarian lingkungan, serta responsif gender	Meningkatnya kapasitas 97.814 petani dan pelaku usaha pertanian dalam mengembangkan agribisnis yang mendukung 4 (empat) sukses pembangunan pertanian, mengantisipasi perubahan iklim, dan kelestarian lingkungan, serta responsif gender
2.3.4	Evaluasi penyelenggaraan pelatihan pertanian yang berkesinambungan	Tersusunnya hasil evaluasi penyelenggaraan pelatihan di 10 UPT Pelatihan Pertanian pusat dan 19 UPT Pelatihan Pertanian daerah	Meningkatnya kualitas kebijakan penyelenggaraan pelatihan oleh 10 UPT Pelatihan Pertanian pusat dan 19 UPT Pelatihan Pertanian daerah
<b>2.4.</b>	<b>Pengembangan Program dan Kerjasama Pelatihan</b>		
2.4.1	Peningkatan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi program pelatihan	Ditetapkannya 14 program pelatihan yang terintegrasi dengan program instansi terkait	Meningkatnya kualitas dan kuantitas penyelenggaraan 14 program pelatihan

NO	KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR	
		OUTPUT	OUTCOME
	pertanian dengan instansi terkait di pusat dan daerah	setiap tahun	pertanian sesuai dengan kebutuhan pemangku kepentingan
2.4.2	Pengiriman widyaiswara/ tenaga ahli, petani serta penyelenggaraan pelatihan pertanian dalam kerangka kerjasama dan membangun jejaring kerja dalam dan luar negeri (bilateral, regional, dan multilateral)	Terfasilitasinya 300 orang widyaiswara/tenaga ahli dan petani yang mengikuti pelatihan/ permagangan bertaraf internasional	Meningkatnya citra Pemerintah R.I. di dunia Internasional di bidang pelatihan pertanian
<b>2.5.</b>	<b>READ</b>		
2.5.1	Pemberdayaan masyarakat dan pembangunan pertanian perdesaan melalui Program READ	Berdayanya masyarakat dan pembangunan pertanian di 150 desa pada 5 kabupaten sasaran READ di Sulawesi Tengah	Meningkatnya aksesibilitas dan kemandirian petani di 150 desa pada 5 kabupaten di Provinsi Sulawesi Tengah.
<b>3.</b>	<b>Revitalisasi Sistem Pendidikan, serta Pengembangan Standardisasi dan Sertifikasi Profesi Pertanian</b>		<b>Meningkatnya jumlah dan profesionalisme aparat fungsional RIHP, tenaga teknis menengah, wirausahawan muda dan SDM pertanian lainnya</b>
<b>a.</b>	<b>Pengembangan Pendidikan, Standardisasi dan Sertifikasi Profesi Pertanian</b>		
<b>3.a.1</b>	<b>Peningkatan Kualitas Pendidikan Pertanian</b>		

NO	KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR	
		OUTPUT	OUTCOME
3.a.1 .1	Akreditasi program studi di STPP	Terbitnya Keputusan Ketua Badan Akreditasi Nasional (BAN) tentang Peringkat Akreditasi 10 Program Studi	Terselenggaranya pendidikan tinggi kedinasan yang akuntabel
3.a.1 .2.	Pengembangan Program Studi Bidang RIHP dan Perkarantinaan di STPP	Terselenggaranya 5 Program Studi Bidang RIHP dan 2 Program Studi Perkarantinaan	Meningkatnya jumlah dan kualitas aparat fungsional RIHP dan Karantina yang kompeten
3.a.1 .3.	Standardisasi sarana dan prasarana di STPP	Terbitnya satu Peraturan Kepala Badan PPSDMP tentang Standardisasi sarana dan prasarana pendidikan pertanian	Terselenggaranya pendidikan kedinasan di 7 STPP sesuai standar nasional pendidikan
3.a.1 .4.	Standardisasi Dosen dan Tenaga Kependidikan	Penetapan Standar pendidik dan tenaga kependidikan di STPP	Terjaminnya mutu penyelenggaraan pendidikan 7 STPP
3.a.1 .5.	Fasilitasi Sertifikasi Dosen tenaga kependidikan	Terfasilitasinya sertifikasi 210 dosen dan 150 tenaga kependidikan	Meningkatnya profesionalisme 210 Dosen STPP
3.a.1 .6.	Penyelenggaraan pendidikan tinggi kedinasan bidang RIHP serta Perkarantinaan Pertanian	Dihasilkannya 2.500 Sarjana Sain Terapan bidang RIHP serta perkarantinaan pertanian	Meningkatnya kualifikasi 2.500 orang aparaturnya pertanian di bidang RIHP serta perkarantinaan pertanian
3.a.1 .7.	Peningkatan pendidikan aparaturnya pertanian melalui program tugas belajar	Dihasilkannya 1.000 orang aparaturnya pertanian yang memiliki jenjang pendidikan S2 dan S3	Meningkatnya kinerja aparaturnya pertanian
<b>3.a.2</b> .	<b>Pengembangan Program dan Kerjasama Pendidikan Pertanian</b>		
3.a.2	Koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi	Terkoordinasikan dan terkonsinkronisasinya	Meningkatnya kualitas program pendidikan,

NO	KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR	
		OUTPUT	OUTCOME
.1	program pendidikan, standardisasi, dan sertifikasi profesi pertanian	program pendidikan, standardisasi dan sertifikasi profesi pertanian	standardisasi, dan sertifikasi profesi pertanian
3.a.2 .2.	Pengembangan kerjasama pendidikan, standardisasi dan sertifikasi profesi pertanian dengan berbagai institusi dalam dan luar negeri	Terselenggaranya 5 kerjasama teknis pendidikan, standardisasi dan sertifikasi profesi pertanian dengan dunia usaha/dunia industri, lembaga pendidikan dan lembaga lain yang terkait	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pendidikan, standardisasi dan sertifikasi profesi pertanian sesuai kebutuhan dunia usaha/dunia industri dari 5 kerjasama teknis
<b>3.a.3</b> .	<b>Pengembangan Standardisasi dan Sertifikasi Profesi</b>		
3.a.3 .1	Pembentukan Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) bidang pertanian	Terbentuknya 10 LSP bidang pertanian	Terlaksananya sertifikasi profesi bagi 5.000 penyuluh pertanian dan 750 non penyuluh pertanian
3.a.3 .2.	Fasilitasi calon asesor bidang pertanian	Tersedianya 500 orang asesor kompetensi bidang pertanian	Meningkatnya kualitas 300 asesor kompetensi bidang pertanian
3.a.3 .3.	Akreditasi UPT Pelatihan Pertanian Pusat untuk menjadi Lembaga Diklat Profesi (LDP) dan Tempat Uji Kompetensi (TUK)	Terakreditasinya 10 UPT Pelatihan Pertanian Pusat sebagai LDP	Terselenggaranya diklat profesi di 10 LDP
		Terakreditasinya 25 UPT sebagai TUK bidang pertanian	Terselenggaranya uji kompetensi di 10 TUK
3.a.3 .4.	Penyusunan SKKNI bidang pertanian dan harmonisasi dengan	Tersedianya 30 SKKNI bidang pertanian sesuai	Terselenggaranya sertifikasi profesi bidang pertanian untuk 30

NO	KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR	
		OUTPUT	OUTCOME
	standar kompetensi kerja di tingkat internasional	standard internasional	SKKNI
<b>b.</b>	<b>Pengembangan Pendidikan Menengah Pertanian</b>		
3.b.1	Pengembangan Program dan Kerjasama Pendidikan Menengah Pertanian		
3.b.1 .1.	Koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi program pendidikan menengah pertanian	Terkoordinasikan dan terkonsinkronisasinya program pendidikan menengah pertanian	Meningkatnya kualitas program pendidikan menengah pertanian
3.b.1 .2.	Pengembangan kerjasama pendidikan menengah dengan instansi terkait, dunia usaha dan dunia industri baik dalam maupun luar negeri	Terselenggaranya 10 kerjasama teknis pendidikan menengah,	Meningkatnya kualitas lulusan pendidikan menengah pertanian
<b>3.b.2</b>	<b>Penataan Kelembagaan Pendidikan Menengah Pertanian</b>		
3.b.2 .1.	Pengembangan SMK-PP menjadi Rintisan SMK-PP bertaraf internasional	Meningkatnya status kelembagaan 10 SMK PP menjadi Rintisan SMK-PP bertaraf internasional	Dihasilkannya 3.000 lulusan dari 10 SMK-PP yang mampu bersaing di pasar kerja lokal dan internasional
3.b.2 .2.	Penyesuaian nomenklatur SPP menjadi Sekolah Menengah Kejuruan Pertanian Pembangunan (SMK-PP)	Terbitnya satu Peraturan Mentan tentang Perubahan Nomenklatur SPP menjadi Sekolah Menengah Kejuruan Pertanian Pembangunan (SMK-PP)	Menguatnya eksistensi 71 unit Sekolah Menengah Kejuruan Pertanian Pembangunan (SMK-PP)
3.b.2 .3.	Standardisasi sarana dan prasarana pendidikan pertanian di SMK PP	Terbitnya satu Peraturan Kepala Badan PPSDMP tentang Standardisasi sarana dan prasarana	Terselenggaranya pendidikan di 71 unit SMK-PP sesuai standar nasional pendidikan

NO	KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR	
		OUTPUT	OUTCOME
		pendidikan pertanian	
3.b.2 .4.	Pengembangan unit usaha agribisnis di Rintisan SMK-PP bertaraf internasional	Tumbuh dan berkembangnya 10 unit usaha agribisnis di Rintisan SMK-PP bertaraf internasional	Dihasilkannya lulusan dari 10 SMK-PP yang mampu menjadi wirausahawan muda pertanian
3.b.2 .5	Penerapan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) di SMK-PP	Meningkatnya mutu pengelolaan di 70 SMK-PP	Meningkatnya mutu lulusan dari 71 SMK-PP
<b>3.b.3</b> .	<b>Penyelenggaraan Pendidikan Menengah Pertanian</b>		
3.b.3 .1.	Peningkatan mutu penyelenggaraan pendidikan menengah kejuruan pertanian di SMK-PP berdasarkan Standar Nasional Pendidikan (SNP)	Dihasilkannya 70.000 lulusan SMK-PP sebagai teknisi menengah pertanian yang kompeten dan calon wirausahawan muda pertanian yang mandiri	Tersedianya tenaga kerja bidang pertanian yang siap pakai sesuai kebutuhan pasar kerja dan wirausahawan muda pertanian
3.b.3 .2.	Fasilitasi pertukaran siswa dan permagangan alumni SMK-PP dalam kerangka kerjasama teknis luar negeri di bidang pendidikan pertanian	Terkirimnya 30 siswa SMK-PP untuk mengikuti pertukaran siswa di sekolah pertanian di luar negeri	Meningkatnya wawasan siswa SMK-PP tentang budaya pertanian di negara lain
		Terkirimnya 60 lulusan SMK-PP untuk magang di perusahaan agribisnis di luar negeri	Meningkatnya keterampilan lulusan SMK-PP di bidang agribisnis
<b>3.b.4</b> .	<b>Peningkatan Ketenagaan Pendidikan Menengah Pertanian</b>		
3.b.4 .1.	Standardisasi Pendidik dan Tenaga	Penetapan Standar pendidik dan tenaga	Terjaminnya mutu penyelenggaraan

NO	KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR	
		OUTPUT	OUTCOME
	Kependidikan di SMK-PP	kependidikan di SMK PP	pendidikan di SMK-PP
3.b.4 .2	Fasilitasi Sertifikasi Guru SMK PP dan tenaga kependidikan	Terfasilitasinya sertifikasi 300 guru SMK PP dan 150 tenaga kependidikan	Meningkatnya profesionalisme Guru dan Tenaga Kependidikan SMK-PP
<b>4.</b>	<b>Dukungan Administrasi Manajemen dan Teknis lainnya</b>		<b>Meningkatnya kepuasan pelayanan birokrasi, serta terciptanya pemerintah yang bersih dan tatakelola pemerintahan yang baik</b>
<b>4.1.</b>	<b>Pemantapan Organisasi, Ketatalaksanaan, Pengelolaan Kepegawaian, dan ketatausahaan</b>		
4.1.1	Penataan Organisasi dan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian	Tertatanya Organisasi Pusat dan 19 UPT Pusat, terselesaikannya 1.250 Produk hukum, dan Terkelolanya 5.325 dokumen administrasi kepegawaian	Meningkatnya kinerja Pusat dan 19 UPT Pusat di bidang pelayanan organisasi, ketatalaksanaan, kepegawaian dan ketatausahaan
<b>4.2.</b>	<b>Pemantapan Sistem Perencanaan</b>		
4.2.1	Peningkatan kualitas Perencanaan Program, Kegiatan, Anggaran, serta Kerjasama Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian	Tersusunnya 10 dokumen data SDM dan ketenagakerjaan pertanian, 10 dokumen kerjasama dalam dan luar negeri, serta terrestrukturisasinya program, kegiatan dan anggaran berbasis kinerja untuk 130 satker setiap tahun.	Meningkatnya efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan BPPSDMP

NO	KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR	
		OUTPUT	OUTCOME
<b>4.3.</b>	<b>Pemantapan Sistem Pengelolaan Keuangan dan Perlengkapan</b>		
4.3.1	Peningkatan kualitas pengelolaan administrasi keuangan dan barang milik negara	Tersusunnya 5 dokumen laporan SAI dan terselesaikannya masalah aset pada 7 UPT	Meningkatnya akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan dan perlengkapan BPPSDMP yang mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
<b>4.4.</b>	<b>Pemantapan sistem Pengendalian, Evaluasi, Pelaporan, dan Kehumasan</b>		
4.4.1	Pengembangan sistem pengendalian, evaluasi, dan pelaporan	Terevaluasinya pelaksanaan program dan kegiatan di 130 satker BPPSDMP, berfungsinya SPI di pusat dan 19 UPT pusat serta terselesaikannya 90% tindak lanjut LHP	Meningkatnya efektifitas, efisiensi, dan akuntabilitas pelaksanaan program dan kegiatan BPPSDMP
4.4.2	Pengelolaan kehumasan dan perpustakaan	Tersedianya 375 materi kehumasan dan terpenuhinya 85% kebutuhan referensi di BPPSDMP	Meningkatnya pelayanan kehumasan untuk membangun citra positif BPPSDMP

Secara lengkap, rencana tindak kegiatan BPPSDMP tahun 2010 – 2014 disajikan pada lampiran.



## **BAB IV. PENUTUP**

Rencana Strategis Tahun 2010–2014 Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian revisi ini disusun sebagai upaya penyesuaian terhadap perubahan organisasi di tingkat kementerian, yang berimplikasi kepada perubahan-perubahan organisasi di bawahnya dan program serta kegiatan sesuai tugas dan fungsi organisasi yang baru.

Rencana Strategis Tahun 2010–2014 Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian revisi ini menggambarkan arah kebijakan, strategi, program dan kegiatan pelaksanaan kegiatan penyuluhan, pelatihan, pendidikan serta standardisasi dan sertifikasi profesi pertanian dengan mengacu pada: 1) hasil-hasil yang dicapai pada periode 2005 – 2009, 2) permasalahan dan tantangan yang dihadapi, dan 3) Rencana Strategis Kementerian Pertanian 2010–2014; serta 4) struktur organisasi dan tugas fungsi yang baru.

Rencana Strategis Tahun 2010 – 2014 ini dimaksudkan sebagai acuan bagi setiap unit kerja eselon II dan UPT lingkup BPPSDMP dalam menyusun Renstra masing - masing unit kerjanya. Renstra dari masing - masing unit kerja tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Renstra BPPSDMP dalam upaya mewujudkan visi dan misi BPPSDMP.

Renstra BPPSDMP Tahun 2010-2014 juga menjadi acuan bagi kelembagaan penyuluhan, pelatihan dan pendidikan pemerintah provinsi dan kabupaten/kota dalam penyusunan rencana kegiatan masing–masing

kelembagaan tersebut, sehingga menghasilkan sinergitas dalam pelaksanaan program BPPSDMP, yaitu Program Pengembangan SDM Pertanian dan Kelembagaan Petani.